

BIDIK

NASIONAL

SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

KPK : 81% Uang Koruptor Mengalir ke Selingkuhan

JAKARTA, BN - Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo berbicara perihal kasus korupsi yang tidak terlepas dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ibnu menyebut para koruptor menyamarkan hasil korupsi dengan

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo. (ist)

PERAS BAWAHAN, MODUS KORUPSI BUPATI TULUNGAGUNG

□ KPK Sita Uang dan 'Surat Sakti'

TULUNGAGUNG, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Tulungagung, mulai rumah ajudan hingga kantor dan rumah pribadi Bupati Gatut Sunu Wibowo. Penyidik menemukan sejumlah bukti, termasuk surat sakti atau pengunduran diri kepala dinas yang diminta Bupati Gatut.

"HARI ini, penyidik memulai rangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Tulungagung. Penggeledahan hari pertama ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu di rumah dinas bupati, rumah pribadi GSW (Gatut Sunu Wibowo), dan rumah YOG (Dwi Yoga Ambal)," kata Juru Bicara (Jubir)

KPK, Budi Prasetyo, Kamis (16/4/2026).

Kantor Bupati berada di lingkungan Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa Tulungagung, sedangkan rumah pribadi Gatut Sunu di Desa Gandong, Kecamatan Bandung dan rumah pribadi Yoga di Desa Sambu, Kecamatan Ban-



Penyidik KPK saat menggeledah kediaman Bupati nonaktif Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

dung, Tulungagung.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengu-

atkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang dilakukan oleh tersangka Bupati Gatut Sunu dan ajudannya Yoga Ambal.

Dalam penggeledahan ini tim KPK menemukan sejumlah dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala organisasi



Gatut Sunu Wibowo saat digelandang petugas KPK.

perangkat daerah (OPD) yang dibuat tanpa tanggal. "Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi alat tekan Bupati kepada para OPD agar pa-

tuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Modus Surat Sakti Bupati Tulungagung Peras Bawah untuk Beli

■ Bersambung ke hal.11 kol.1

Bongkar Dugaan Korupsi Hibah DPUBM Jatim⁽⁵⁾

□ KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri Diminta Usut

SURABAYA, BN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur kembali menemukan potensi kerugian keuangan daerah dalam penyelenggaraan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Jawa Timur (Jatim) Tahun Anggaran 2023.

Temuan penyalahgunaan dana hibah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah tersebut terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan nomor 41.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 BAB 1 Huruf C Belanja Daerah Nomor 12. Dengan pokok-pokok temuan

sebagai berikut :

1. Kelebihan perhitungan dari kekurangan volume pekerjaan atas realisasi hlbah pada 10 Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebesar Rp. 245.786.338.00;

2. Sebanyak 3 Pokmas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen hukum sampai

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Kepala Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Edy Tambeng Widjaja



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa

Gerai Perizinan Siap Hadir di Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

□ Percepat Dokumen Kapal dan Akses BBM Subsidi



Rapat koordinasi pembukaan gerai perizinan dokumen kapal di UPT PPP Bulu. (ist)

TUBAN, BN - Kabar segar datang bagi para nelayan di wilayah kerja UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu. Menanggapi keluhan nelayan terkait rumitnya proses pengurusan dokumen kapal, pemerintah segera menghadirkan Gerai Perizinan sebagai solusi jemput bola untuk mempercepat legalitas melaut dan mempermudah akses BBM bersubsidi.

Keputusan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Cumi-Cumi pada Kamis (19/2/2026), yang dipimpin langsung oleh Kepala PPN Brondong bersama Kepala UPT PPP Bulu.

Selama ini, banyak nelayan mengeluhkan lamanya proses perizinan yang menghambat mereka mendapatkan rekomendasi BBM bersubsidi. Untuk mengatasi hal tersebut, rapat menyepakati beberapa poin penting:

Pembukaan Gerai Perizinan : Akan dilaksanakan khusus untuk membantu percepatan dokumen, terutama bagi kapal berizin pusat yang mengalami kendala.

Bantuan Cek Fisik : Kapal dengan izin daerah akan mendapatkan bantuan pengecekan kelaikan kapal secara langsung.

Petugas Khusus (Enumerator) : PPN Brondong akan menugaskan satu orang petugas khusus untuk mencatat hasil tangkapan dan membantu pelayanan pembayaran PNPB pasca produksi agar lebih transparan dan mudah.

Selain memberikan kemudahan, otoritas pelabuhan juga mencatat masih terdapat 45 kapal yang teridentifikasi belum mengurus dokumen perizinan sama sekali. Pihak pelabuhan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi serta Kabupaten Tuban akan segera memanggil pemilik kapal tersebut dan memberikan surat peringatan.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa ada dua alasan utama mengapa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal izin pusat seringkali lama terbit: Antrean Panjang: Saat ini terdapat sekitar 1.000 kapal yang sedang dalam proses antrean di pusat.

Ketidaksesuaian Data: Adanya evaluasi karena data laporan produksi tangkapan tidak sesuai dengan kapasitas palka kapal selama satu tahun terakhir.

Kepala UPT PPP Bulu menghimbau agar seluruh nelayan Bulu bersikap proaktif. "Kami meminta nelayan hadir dan memanfaatkan gerai perizinan ini nantinya. Siapkan semua berkas yang dibutuhkan agar prosesnya lancar, sehingga urusan BBM bersubsidi tidak lagi terkendala."

Jadwal pasti pelaksanaan gerai perizinan saat ini sedang dikoordinasikan dengan pihak KKP di Jakarta. Para nelayan diharapkan segera mempersiapkan dokumen pendukung mulai dari sekarang. (adv/red)

Terlibat Korupsi Perizinan, Kadis ESDM Jatim Ditahan

□ Kejati Sita Uang Rp 2,3 Miliar Hasil Pungutan

SURABAYA, BN - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Aris Mukiyono tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan. Selain Kadis ESDM, Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan, Oni Setiawan dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H, terut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi perizinan.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejati Jatim, Wagiyono Santoso pada, Jumat (17/4), mengatakan penetapan 3 tersangka merupakan tindak lanjut dari penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat. "Perkara ini berawal dari adanya pengaduan oleh pemohon izin. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian ditingkatkan ke penyidikan sejak 14 April 2026," kata Wagiyono, Santoso, Jumat 17 April 2026 di Surabaya.

Dalam pengembangan penyidikan, penyidik menemukan sejumlah bukti transfer uang dan juga percakapan melalui pesan singkat whatsapp yang menguatkan dugaan terjadinya tindakan korupsi.

Lebih lanjut dijelaskan, para tersangka diduga memperlambat proses penerbitan izin yang seharusnya dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dari keterangan para saksi, pemohon yang tidak memberikan sejumlah uang dipersulit atau dihambat meski persyaratan pemohon penerbitan izin telah lengkap.

■ Bersambung ke hal.11 kol.5



Kadis ESDM Jatim, Aris Mukiyono (baju tahanan) saat digelandang petugas atas dugaan Korupsi Perizinan

Dalami Korupsi Hibah Jatim, KPK Periksa 13 Saksi

BANGKALAN, BN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami perkara dugaan korupsi hibah APBD Jatim. Hingga Kamis (16/4/2026), penyidik KPK telah memeriksa sedikitnya 13 saksi di Mapolres Bangkalan.

Pemeriksaan tersebut bagian dari penyidikan mega korupsi Hibah APBD Jatim yang digelontorkan pada Kelompok Masyarakat (Pokmas) Tahun Anggaran 2019 hingga 2023.

Menurut sumber informasi BIDIK NASIONAL (BN) rangkaian pemeriksaan berlangsung sejak, Senin 13 April 2026 hingga, Rabu 15 April 2026. KPK memanggil sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan terkait proses pengajuan, pelaksanaan, pertanggungjawaban penggunaan hibah yang diketahui para pihak tersebut.

Kesembilan saksi tersebut, antara lain HDR dari Pokmas Rahwana, - AST dari Pokmas Dharma, - MRM dari Pokmas Pemimpin, - MUH Pokmas Samikna, - SJK dari Pokmas Kenyamanan, AYN dari Pokmas Akar Daun, - MS dari Pokmas Pangestoh, - MG dari Pokmas

■ Bersambung ke hal.11 kol.1



Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Jakarta Selatan. (ist)

LOWONGAN WARTAWAN

Koran BIDIK NASIONAL membutuhkan Wartawan yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia. Peminat bisa kirim lamaran ke Jl. Ikan Lele 2/C14 Bluru Permai, Bluru Kidul, Sidoarjo atau Hubungi Bos EDY (HP/WA: 08123209649) email : bidiknasional@yahoo.com

Diduga Menyimpang, Proyek Mall Pelayanan Publik Jombang Patut Diusut

JOMBANG, BN - Fenomena Kepala Disdikbud Jombang Wor Windari diduga menghindari saat di konfirmasi Wartawan Bidik Nasional (BN), ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan kode etik publik. Tindakan ini sering menimbulkan kecurigaan bahwa pejabat tersebut berusaha menyembunyikan sesuatu atau tidak bekerja dengan transparan.

Seperti pada pengadaan barang dan jasa terkait Proyek Mall Pelayanan Publik tahun 2024-2025, proyek MPP dari Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Terpadu (DPMPITSP) Jombang tersebut sudah berjalan dan sudah selesai pada menjadi sorotan, karena diduga ada korupsi pada penggunaan uang Negara untuk pelaksanaan pada proyek tersebut.

Ketika Wor Windari ditemui ruang Sekdin (Sekretaris Dinas) DPMPITSP Jombang, "Saya tidak tahu apa-apa pak, saya juga gak dapat uang waktu itu," ujarnya kepada BN.

Sedangkan Sekdakab Jombang Agus Purnomo ketika dimintai pendapat terkait pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Jombang ketika dipimpin Wor Windari sebagai Plt DPMPITSP Jombang, "Sudah tanya saja sama Bu Wor" jawabnya ketus.

Menurut pandangan LSM Forum Transparansi Anggaran Nasional (FORTAN), Surabaya, "Diduga proyek MPP tahun 2024-2025 tidak memenuhi standar kelayakan, kualitas buruk serta tidak sesuai spek dan bestek yang telah ditentukan. Proyek tersebut diduga sangat berpotensi merugikan Negara," ujarnya.

Hasil investigasi dari mereka, ada dugaan tidak sesuai fakta riil di lapangan, bahwasannya ada dugaan telah terjadi perbuatan melawan hukum, yang dilakukan Plt. Kepala DPMPITSP Jombang periode tahun 2025-2025, PPK PPTK dan bendahara terkait dugaan penyelewengan pelaksanaan paket pekerjaan rehab gedung sederhana MPP, nilai Rp 1.536.240.000,- (Tahun Anggaran 2024 dan rehab bangunan gedung Kantor MPP di lantai 2 nilai Rp 1.850.000,- (Tahun Anggaran 2025) di DPMPITSP Jombang.

Sesuai data yang di peroleh dari Tim Investigasi LSM FORTAN Surabaya, adanya dugaan Penyimpangan dan/ atau Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Plt Kepala DPMPITSP Jombang Wor Windari di tahun periode 2024-2025. Sementara dari hasil kajian LSM FORTAN Surabaya segera melaporkan ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jawa-Timur. Diantara laporan yang akan di berikan ke Kejati Jatim di antaranya, didapatkan bukti petunjuk yang mengarah



Mall Pelayanan Publik (MPP) milik DPMPITSP Jombang ketika masih



Mall Pelayanan Publik selesai dibangun.



Wor Windari yang dulu sebagai Plt. DPMPITSP, sekarang Kepala Dikdisbud Jombang.

adanya tindakan korupsi, berupa fisik pekerjaan yang tidak memenuhi standar kelayakan, kualitas buruk serta tidak sesuai bestek dan yang telah ditentukan.

Selain Wor Windari sebagai Plt. Kepala DPMPITSP Jombang (sekarang Kadisbud), masih ada yang perlu diperiksa diantaranya adalah PPK, PPTK, bendahara dan semua pejabat yang berkompeten menangani Proyek MPP DPMPITSP Jombang diduga ikut terlibat, adanya, Mark-Up atau menggelembung anggaran (dana/ dana nominal anggaran pada rencana anggaran kegiatan pelaksanaan rehab gedung sederhana tahun anggaran 2024-2025. Diantaranya, Mark-Up biaya tenaga kerja, bahan material, peralatan, biaya over head (kantor dan lapangan), transportasi, dan margin keuntungan yang di inginkan oleh kontraktor. Diduga semua atas kebijakan Plt. Kepala DPMPITSP Jombang.

Masih juga ada nya temuan bahwa ada nya perencanaan yang buruk terjadi karena kurangnya nya study kelayakan yang komprehensif, serta perencanaan yang tidak realistis mengenai anggaran, waktu dan sumber daya yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut info dari nara sumber yang di dapat dari Bidik Nasional (BN) dan juga untuk mendukung melengkapi laporan LSM FORTAN Surabaya ke Kejati Jatim, bahwa diduga adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan/ Abuse Of Power, yaitu dengan sengaja membuat kebijakan "Meminta/ menerapkan Komitmen Fee dengan presentase tertentu terhadap rekanan/ kontraktor yang mengerjakan pelaksanaan rehab gedung sederhana MPP tahun 2024-2025.

Sementara itu menurut Nara sumber yang di terima lagi, bahwa didapat temuan, bahwasannya ada dugaan kuat telah terjadi kesalahan dalam menentukan "Back Up Data Konstruksi" baik terkait dengan "Back Yo Data Kuantitas" maupun "Back Up Data Kualitas".

Sedangkan konsultan perencanaan diduga telah melakukan kesalahan, yaitu diduga kuat salah dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan dan bahan material, durasi, dan rencana urutan kerja yang tidak lengkap dan tidak tersusun dengan baik. Hal tersebut di sinyalir adanya unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau sebuah korporation.

Selain itu diduga adanya campur tangan dari para elit birokrasi atau kepentingan pribadi, sehingga evaluasi terhadap CV / Rekanan tidak maksimal, dan sebagai

imbasnya diduga pada hasil final pekerjaan buruk, tidak berkualitas.

Menurut salah satu tokoh masyarakat Jombang yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan ketika di mintai pendapat oleh BN, dan paham betul soal pekerjaan proyek, diduga bahwa terdapat ketidak wajaran dan ketidak patutan antara besaran nominal yang dianggarkan dengan paket kegiatan realisasi pelaksanaan rehab gedung sederhana MPP Jombang tahun 2024-2025. Yakni snai jenis kegiatan dengan nominal anggaran tidak seimbang. Sehingga sangat jelas dan kentara sekali bahwa diduga telah terjadi penggelembungan/Mark-Up. Bahkan ada dugaan tidak ada melakukan pengawasan secara maksimal, lemahnya pengawasan tersebut, menyebabkan kegiatan tersebut bekerja semauanya.

Perlu diketahui, lemahnya pengawasan pada proyek fisik dapat mengakibatkan berbagai masalah serius, termasuk pemborosan anggaran, keterlambatan proyek, kualitas hasil yang buruk, bahkan resiko keselamatan pekerja. Keterlambatan proyek dan pemborosan anggaran dapat terjadi karena pengawasan yang tidak efektif menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, penggunaan bahan tidak sesuai, dan kurangnya koordinasi antar tim. Kualitas yang buruk dapat berakibat pada kerusakan infrastruktur nantinya. Lemahnya pengawasan dapat menciptakan peluang bagi korupsi dan tindakan ilegal lainnya. Atas temuan tersebut, Maja patut diduga bahwasannya Plt. kepala DPMPITSP Jombang Wor Windari, PPK, PPTK, Bendahara, Rekanan, Pelaksana, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawasan bersama - sama diduga kuat telah melakukan "Perbuatan melawan hukum", berupa memanipulasi data dan merekayasa LPJ+ Laporan Pertanggung Jawaban) atas realisasi kegiatan pelaksanaan Rehab Gedung Sederhana MPP tahun anggaran 2024 dan Rehab Gedung Kantor MPP lantai 2: tahun anggaran 2025 di DPMPITSP Jombang. (Tok)

JPU Tuntut Kades Beringinbendo 4 Bulan Penjara dalam Kasus KDRT Psikis



Proses persidangan terhadap Terdakwa Sholeh Dwi. (Foto: Teddy Syah/BN)

SIDOARJO, BN – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo menuntut terdakwa Sholeh Dwi Cahyono, kepala desa Beringinbendo aktif dengan tuntutan pidana empat bulan penjara. Menurut Penuntut Umum, Wachid, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan melanggar dakwaan subsider pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekeerasan Dalam Rumah Tangga.

Dihadapan Majelis Hakim, jaksa menyatakan bahwa terdakwa Sholeh Dwi

Cahyono terbukti melanggar dakwaan subsider. "Menyatakan terdakwa Sholeh Dwi Cahyono, kami menuntut dengan pidana penjara selama 4 bulan," ujar Wachid saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kamis, (16/4/2026).

Jaksa menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak disertai denda, meskipun dalam ketentuan pasal yang dilanggar terdapat opsi hukuman alternatif berupa denda maksimal Rp20 juta. "Memang ada alternatif pilihan berupa denda, namun kami menilai pidana penjara lebih tepat dalam perkara ini," tambahnya.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut bahwa selama persidangan terungkap adanya tindakan kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Bentuk kekerasan tersebut berupa ucapan-ucapan yang menyakitkan dan berdampak serius pada kondisi mental korban.

"Perbuatan terdakwa berupa kata-kata yang membuat korban tersakiti secara psikis, hingga berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, korban mengalami simpptom stres yang sangat parah," jelasnya.

Salah satu contoh ucapan yang disampaikan terdakwa di persidangan turut diungkap, yang dinilai memperkuat unsur kekerasan psikis dalam perkara ini.

Sementara hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa terus terang dan bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan berlangsung.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembelaan (pledoi) dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir.

Sementara pelapor atau mantan istri terdakwa, Suwarni berharap kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan dengan seberat-beratnya dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya tuntutan pidana empat bulan penjara tidak sesuai dengan penderitaan yang dialaminya.

"Saya mohon kepada majelis hakim supaya mendengarkan apa yang menjadi keinginan saya sebagai korban," harapnya. (Teddy Syah)

Akses Strategis Jalan Desa Bohar Rusak Parah, Harapan Warga Terbentur Janji Realisasi Pemkab



Kondisi infrastruktur jalan rusak di Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo di depan warung kopi yang berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) Bohar (yah)

SIDOARJO, BN – Kondisi infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Jalan Desa Bohar, Kecamatan Taman, dilaporkan mengalami kerusakan yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan langsung Wartawan Bidik Nasional (BN) di lokasi pada Kamis (16/4) siang, akses jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga tersebut kini dalam kondisi hancur dan sulit dilalui.

Titik kerusakan terparah terpantau berada di sebelah barat Perumahan Cipta Karya dan sebelah timur Perumahan Star Safira Regency. Ironisnya, pemandangan jalan rusak ini terlihat jelas tepat di depan warung kopi yang

berdiri di atas Tanah Kas Desa (TKD) Bohar.

Jalan yang semula merupakan konstruksi paving ini kini sudah tidak lagi rata. Banyak bagian paving yang lepas dan menyisakan lubang mendalam serta gundukan tanah yang membahayakan pengendara, terutama saat cuaca buruk.

Padahal, jalur ini bukan sekadar jalan desa biasa. Nuy, seorang warga setempat yang sedang berada di warkop depan lokasi kerusakan, mengungkapkan betapa vitalnya jalur tersebut.

"Jalan ini sangat penting bagi warga dari Sukodono, Wonoyo, hingga Tulangan. Bagi mereka yang bekerja di Surabaya, Waru, atau Taman, ini adalah jalur paling strategis dan tersingkat. Kami sangat ingin jalan ini segera diperbaiki sebelum memakan korban," keluh Nuy kepada BN.

Pemerintah Desa Sudah Mengadu, Pemkab Belum Bertindak

Menanggapi keluhan warga, Kepala Desa Bohar, H. Mistur, SH., angkat bicara. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, ia membenarkan bahwa kondisi tersebut sudah menjadi perhatian serius pihak desa. Namun, keterbatasan anggaran desa membuat perbaikan total harus bergantung pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

H. Mistur menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Segala prosedur administratif untuk permohonan perbaikan sudah ditempuh. "Kami sudah mengajukan perbaikan jalan tersebut kepada Pemkab Sidoarjo. Namun, sayangnya sampai sekarang belum ada realisasi di lapangan," ujar H. Mistur.

la sangat berharap agar dinas terkait di Pemkab Sidoarjo segera turun tangan melakukan eksekusi perbaikan. Mengingat volume kendaraan yang melintas sangat tinggi, penundaan perbaikan hanya akan memperparah kerusakan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat luas. (yah)

BERITA MINGGUAN INVESTIGASI

BIDIK
NASIONAL

TERBIT SEJAK 1 JUNI 1999

PEMIMPIN UMUM : Pudji Leksono. PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB : Edy Sutanto. PEMIMPIN PERUSAHAAN : Teddy Syah Roni. PENASEHAT HUKUM : Yustinus Haryanto, SH. REDAKTUR PELAKSANA : Budi Santoso. REDAKTUR : A Karim, EM Liswandi, Zaenal Ikhsan, Agus. TIM LIPUTAN KHUSUS : Toddy Pras Hendarto (Koordinator), Suprawoto, Suwoto, Supardi. JAWA TIMUR : SURABAYA : Dymas Ma'rufi Santoso, Abd Rossi, Ninik Rachmawati. SIDOARJO: Nur Yahya. GRESIK : Ariadi AM, Subkan Arif. PAMEKASAN : Ainur Halis. SUMENEP : Adi Yusman, Ishak. SAMPANG : Holilullohman. MOJOKERTO : Husnan. JOMBANG : Totok Agus Hariyanto (Kabiro), Devi Setyorini. NGANJUK : Agung Moch. Suhada, Sugianto, Dodik Andiyanto. KEDIRI : Nyoto Dharmawan. TULUNGAGUNG/TRENGGALEK : Nik Atin. MADIUN: Basuki. NGAWI : Leo Lunardi T. MAGETAN : Ashar AR. PONOROGO : Andhy Wijaya. LAMONGAN : Syaiful Anam, Joko Santoso. BOJONEGORO : Priyanto. MALANG RAYA : Nino Wiwantara. BLITAR : Budi Sastro. PASURUAN : Toddy Pras Hendarto. PROBOLINGGO/LUMAJANG : Sonny Narwani. JEMBER : Agus Budiono. SITUBONDO : Agung Chornelis (Kabiro), Hari Sulisty. BONDOWOSO : Rukwandanu. BANYUWANGI : Djoni DW (Pelalawan). SUMATERA SELATAN : PALEMBANG : Yanthi Mahameru. LAHAT/MUARA ENIM : Adi Nurrahman. PAGAR ALAM : Marleo Tanjung. OGAN KOMERING ULU/OKU SELATAN : M Azhary MY, OKU TIMUR : Nelis Sri Wahyuni. OKI : Nurlis Oktari. SUMATERA UTARA. KOTA MEDAN: Muhammad Syaefi Harahap. LABUHANBATU : M. Sukma (Kabiro). PAKPAK BHARAT : Tennyang Tumangger (Kabiro), Dariono. DELI SERDANG : Heri Siswoyo. - NANGROE ACEH DARUSSALAM GAYO LUES : Sutrisno (Kabiro). Simson Sitepu. SUBULUSSALAM : Agus Darminto Bancin (Kabiro), Imran Cibro. ACEH SINGKIL :Roni Syehrani (Kabiro), Nurhalimah. BIREUM : Hendra S. BANGKA BELITUNG: Agusman Sirait (Kabiro), Tamrin. JAMBI, TANJUNG JABUNG BARAT: Joni Efendi. TEBO : Wendri Putra Rezky. NUSA TENGGARA BARAT : MATARAM: Hidayatul Aini (Kabiro). PAPUA : Junjungan Silalahi. LAYOUT/IT Nur Hayati PEMASARAN/ADMINISTRASI/KEUANGAN: Dita Zahra Amalia. PENERBIT : PT Bidik Nasional Pers (BNP). AKTE NOTARIS : LUTFI AFANDI, SH, M.Kn No 19 Tgl 19 Desember 2014. SK MENKUMHAM : No AHU-0003466.AH.01.01 Tgl 26 Januari 2015. AKTE NOTARIS PERUBAHAN : Iwan Saleh Irawan, SH, No 02 Tgl 4 Februari 2020. SK MENKUMHAM PERUBAHAN : No AHU-0010003.AH.01.02. Tahun 2020 NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BERBASIS RESIKO: 0220105231819. NPWP: 72.007.891.4-617.000. ALAMAT : Jl. Ikan Lele 2 Blok Ci No 14, Perum Bluru Permai, Kel. Bluru Kidul, Kec./Kab. Sidoarjo, Jawa Timur Kode Pos 61233. JAKARTA : Jl. Tentara Pelajar No. 35 RT.01/06 Jakarta 12210, Telp. 021-53661085. BANK: Rek Giro BRI Cabang Sidoarjo No. 0086-01-002254-30-B/ Rek Giro Bank Jatim Cab Sidoarjo No. 0261050731 An PT Bidik Nasional Pers. WEBSITE : https://bidiknasional.com. Percetakan : PT. Aksara Grafika Surabaya, Jl. Brigjen Katamsno No. 45 Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik Wartawan Bidik Nasional Dilengkapi Kartu Tanda Pengenal, Namanya Tercantum Dalam Box Redaksi, Dilindungi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik PENGADUAN HOT LINE : 08123209649, 087748103562, 031-99728729. Email: bidiknasional@yahoo.com/ bidiknasional1@gmail.com/bidiknasional2@gmail.com

SEGALA PUBLIKASI YANG DITERBITKAN DI MEDIA INI MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PENANGGUNGJAWAB REDAKSI

Kawal Kasus Korupsi Pokir, Gabungan Aktivistis Magetan Gelar Demo di DPRD dan Kejari

MAGETAN, BN - Meski cuaca dingin menyelimuti Kabupaten Magetan, hal tersebut tak menyurutkan semangat puluhan aktivis untuk turun ke jalan. Gabungan ormas dan koalisi aktivis menggelar aksi damai guna mengawal penanganan kasus dugaan korupsi Dana Pokok Pikiran (Pokir) yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan, Kamis (16/4/2026).

Massa yang tergabung dalam DPD Grib Jaya Magetan, Orang Indonesia (OI), Koalisi Aktivistis Lintas Sektor (KALIS), Magetan Center, dan Rumah Kita, serta sejumlah aktivis independen, memulai aksinya di Kantor DPRD Magetan. Di sana, mereka diterima oleh tiga perwakilan anggota dewan.

Dalam orasinya di depan gedung legislatif, Syaiful Anam dari aktivis Oi menyampaikan pesan tegas kepada para anggota dewan. Ia meminta agar seluruh pihak yang terlibat kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

"Bila ada panggilan ataupun undangan dari pihak Kejari Magetan, penuhi panggilan itu demi kelancaran proses hukum. Jangan menghindar dengan berbagai alasan yang justru bisa menghambat jalannya keadilan," tegas Syaiful.



Gabungan Aktivistis Magetan saat Gelar Aksi Damai di DPRD dan Kejari. (ashar)

Setelah dari gedung DPRD, massa bergerak menuju Kantor Kejari Magetan. Perlu diketahui, kasus yang dilaporkan sejak November 2025 ini telah menunjukkan perkembangan signifikan. Memasuki April 2026, status perkara telah resmi naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

Kasi Intel Kejari Magetan, Moh. Andi Sofyan, yang menemui langsung para peserta aksi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menangani perkara ini secara profesional dan transparan.

"Tuntutan dari teman-teman aksi kami terima sebagai bentuk dukungan. Kami merespon dan berkomitmen menangani perkara ini secara profesional. Jumat pekan lalu, status perkara memang telah ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujar Andi Sofyan.

Lebih lanjut, Andi memaparkan bahwa tim penyidik saat ini sedang bekerja keras mengumpulkan alat bukti untuk menentukan siapa saja pihak yang paling bertanggung jawab. Sejauh ini, tim penyidik telah melakukan pengecekan dan penyitaan barang bukti di enam titik berbeda. Saat ditanya mengenai calon tersangka dalam kasus ini, Andi meminta masyarakat untuk bersabar. "Terkait hal itu (tersangka), tunggu kabar resmi selanjutnya dari kami," pungkasnya. (Ashar)

Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Bupati Tegaskan Komitmen Optimalisasi Tata Kelola Aset dan Pelayanan Publik



MADIUN, BN - DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD, Rabu (15/4/2026) bertempat di ruang rapat.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan sidang, Mujono dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota fraksi, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, hingga direktur BUMD dan RSUD.

Dalam pengantarnya, Mujono menegaskan agenda paripurna ini merupakan lanjutan dari tahapan pembahasan Raperda yang telah melalui penyampaian pandangan umum fraksi.

"Rapat Paripurna ini dalam rangka penyampaian

jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Madiun dalam rangka pembahasan dua rancangan peraturan daerah non APBD," ujarnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum, masing-masing melalui juru bicara, yakni dari Fraksi Golkar Nurani Rakyat, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan jawaban atas berbagai masukan, saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi.

Pada sektor pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Bupati menyatakan pentingnya optimalisasi dan penataan aset

agar tidak membebani keuangan daerah.

"Barang Milik Daerah yang sudah tidak memberikan manfaat atau membebani keuangan daerah perlu dievaluasi melalui proses inventarisasi. Terhadap barang yang masih dapat dimanfaatkan akan dioptimalkan penggunaannya, sedangkan yang rusak dan tidak bermanfaat akan dilakukan penjualan melalui mekanisme lelang sesuai peraturan," jelasnya.

Terkait dorongan digitalisasi dari fraksi, Pemkab Madiun disebut telah mengimplementasikan sistem berbasis aplikasi dalam pengelolaan aset.

"Pemerintah Kabupaten Madiun telah melakukan digitalisasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah dengan memanfaatkan aplikasi SIMDA BMD dan E-BMD, guna mempermudah pencatatan, meminimalkan duplikasi data, dan mendorong terbit administrasi," imbuhnya.

Selain itu, Bupati juga menanggapi terkait pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Dharma Purabaya, termasuk komitmen peningkatan pelayanan publik dan tata ke-

lola perusahaan.

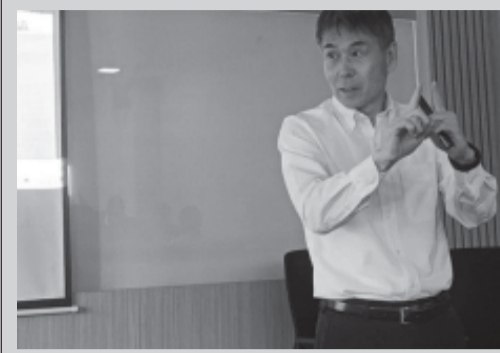
"Pelayanan air bersih merupakan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, Perumda Air Minum harus mengutamakan fungsi pelayanan publik tanpa mengabaikan kinerja perusahaan," tegasnya.

Dalam aspek tarif, pemerintah daerah akan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. "Penyesuaian tarif dilakukan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat kecil," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati juga mengakui masih adanya sejumlah tantangan dalam pengelolaan aset daerah. "Realita di lapangan memang masih terdapat beberapa permasalahan seperti administrasi yang belum tertib, pemanfaatan yang belum optimal, serta lemahnya pengendalian internal. Namun pemerintah daerah terus berupaya melakukan perubahan secara bertahap," ungkapnya.

Usai penyampaian jawaban Bupati, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda internal DPRD berupa pembentukan panitia khusus (pansus) guna menindaklanjuti pembahasan dua Raperda tersebut. (Adv/bas)

Workshop Laws of The Game, Yoshimi Ogawa: Peran Penting Media dalam Sepak Bola



Yoshimi Ogawa saat beri materi terhadap media. (Teddy Syah)

SURABAYA, BN - Puluhan jurnalis di Surabaya dan sekitarnya antusias mengikuti Workshop Laws of The Game yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dan didukung Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (18/4/2026).

Program yang digelar di ruang Studio Gedung U5 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Unesa tersebut menghadirkan narasumber Ketua Komite

Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. Selama dua jam lebih, para jurnalis yang sering meliput kompetisi sepak bola Indonesia dari kasta terbawah hingga teratas serta pertandingan timnas di semua level usia mendapatkan banyak wawasan baru terkait aturan-aturan perwasitan sepak bola terkini dari Ogawa.

Pengalaman panjang selama 30 tahun berkecimpung di dunia perwasitan membuat Ogawa seperti seorang master yang membagikan ilmu seputar Laws of The Game kepada para jurnalis. Oleh karena itu, pengetahuan yang ia bagikan sangat bernilai.

Ogawa bercerita, Komite Wasit PSSI telah menjalankan edukasi dan pelatihan wasit secara berkesinambungan dari level grassroots hingga level tertinggi. Termasuk memastikan lingkungan kerja yang nyaman dan keselamatan wasit sehingga dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. "Namun, masih ada bentuk kekerasan terhadap perwasitan dari level amatir hingga tertinggi," tegas Ogawa.

Pria kelahiran tahun 1959 itu menyebut dirinya tidak dapat memahami perspektif bahwa ketika tim kalah, yang disalahkan adalah wasit. Normalnya, kata dia, mereka yang bekerja di perwasitan tidak menerima komplain. Namun, Ogawa mengubah pola pikir tersebut. Dia membuka ruang komunikasi dengan pihak klub, bahkan rajin mendatangi klub-klub. "Salah satu tujuannya, kami ingin memperdalam pemahaman klub-klub tersebut terhadap perwasitan. Dari situ kami dapat wawasan tentang bagaimana sepak bola Indonesia berjalan," jelasnya.

"Kadang interpretasi klub berbeda dengan Laws of The Game. Kami memberi umpan balik sesuai dengan Laws of The Game," imbuhnya.

Bahkan, Komite Wasit PSSI kini memiliki "Refer System" yang memungkinkan klub yang ingin bertanya atau menyampaikan komplain setelah pertandingan dapat melakukannya melalui aplikasi tersebut, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Adapun poin-poin komplain difokuskan pada empat hal, yakni gol atau tidak, penalti atau tidak, kartu merah langsung atau tidak, dan mistaken identity.

"Setahu kami, hanya Indonesia yang memakai sistem ini di ASEAN. Di Asia pun hanya sedikit negara yang menggunakannya," terangnya.

Media Briefing Digelar Sejak 2023

Terkait media briefing, Ogawa menjelaskan bahwa kegiatan ini telah dijalankan sejak pertengahan 2023 di Jakarta. Dia menyebut di JFA (PSSI-nya Jepang) kegiatan ini juga dijalankan secara reguler.

Berkaitan dengan media briefing tersebut, Ogawa menyoroti pemberitaan di beberapa media terkait pertandingan sepak bola. Menurutnya, masih ada media yang menulis berita berdasarkan opini maupun interpretasi pribadi, meskipun beberapa artikel sudah benar dari sisi Laws of The Game.

Padahal, lanjut dia, pemberitaan yang ditulis para jurnalis dapat berdampak pada masyarakat. "Itulah mengapa teman-teman media juga memegang peranan kunci dalam sepak bola di Indonesia. Kami hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang Laws of The Game agar kita bersama-sama bisa mengembangkan sepak bola Indonesia," terang Yoshimi Ogawa dengan suara tegas.

Tidak hanya menyampaikan paparan, acara ini juga berlangsung interaktif dengan komunikasi dua arah. Utamanya ketika Ogawa memutar video cuplikan video pertandingan dari BRI Super League maupun Pegadaian Championship, termasuk momen key match incident (KMI) seperti keputusan penalti, pelanggaran berujung kartu merah, hingga handball.

Ogawa kemudian mengajak para jurnalis untuk menganalisis insiden tersebut, apakah termasuk pelanggaran atau tidak serta apakah layak diberikan penalti. Singkatnya, para jurnalis mendapatkan wawasan penting mengenai Laws of The Game sepak bola.

Mewakili Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Unesa, Prof. Dr. Or. Gigih Siantoro, S.Pd., M.Pd., mengatakan Unesa sangat mendukung agenda workshop tersebut.

"Kami dengan senang hati mendukung agenda yang sangat positif ini. Banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan. Unesa membuka diri apabila agenda ini akan dilaksanakan kembali," ujar Gigih.

Para peserta juga menyatakan senang dapat mengikuti workshop tersebut. "Acara workshop ini sangat penting bagi kami untuk memperbarui wawasan seputar Laws of The Game. Ada banyak wawasan yang saya dapatkan dari penjelasan Pak Ogawa," Ungkap Shava dari suarasurabaya.net yang menjadi salah satu peserta workshop.

(Teddy Syah)

Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Sampaikan 29 Rekomendasi atas LKPj Bupati TA 2025

SIDOARJO, BN - DPRD Kabupaten Sidoarjo menyampaikan 29 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Kamis (16/4/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Abdullah Nasih, didampingi Wakil Ketua Suyarno, Kayan, dan Warih Andono. Hadir dalam agenda tersebut Bupati Sidoarjo Subandi, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Juru bicara DPRD, M. Rojik, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah. "Rekomendasi ini menjadi bentuk komitmen DPRD dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia menjelaskan, rekomendasi DPRD mencakup sejumlah aspek, antara lain perencanaan pembangunan, penganggaran, regulasi daerah, serta kebijakan strategis kepala daerah. Pada sektor pendidikan, DPRD menyoroti masih tingginya angka anak tidak sekolah (ATS). DPRD meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk menekan angka tersebut.

Upaya yang disarankan antara lain penguatan program penjangkauan, pencegahan putus sekolah, serta perluasan akses pendidikan yang inklusif dan merata. Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan program beasiswa, termasuk rencana penyediaan 10.000 beasiswa kuliah, peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia usaha, serta program afirmasi untuk memperluas akses pendidikan tinggi.

Meski capaian indeks infrastruktur pendidikan dalam LKPj dilaporkan melebihi target, DPRD menilai kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian. Tercatat masih terdapat ratusan ruang kelas dalam kondisi rusak, yakni 434 ruang kelas sekolah dasar negeri (SDN) dan 170 ruang kelas sekolah menengah pertama negeri (SMPN). DPRD meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan tersebut. Di sektor kesehatan, DPRD menyoroti pembangunan dua puskesmas yang diharapkan dapat direalisasikan pada 2026. Selain itu, DPRD juga meminta percepatan penyelesaian pembangunan rumah sakit di wilayah Sedati yang sebelumnya mengalami keterlambatan.

"DPRD meminta pembangunan rumah sakit dapat diselesaikan dan dioperasikan sesuai rencana, dengan tetap memastikan kesiapan sumber daya manusia," kata Rojik. Rekomendasi DPRD ini selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan. (yah)

Pemkab Sidoarjo Monev Pilkades Sidokeping, Netralitas Panitia Jadi Sorotan

SIDOARJO, BN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memantau persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang digelar Mei mendatang. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) bersama Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra, monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan di Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, Rabu (15/4/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Dinas PMD, Asisten Satu Pemkab Sidoarjo, perwakilan Kejaksaan Negeri Sidoarjo bidang Jaga Desa, Forkopimda Buduran, dua calon kepala desa beserta perwakilan satu calon yang berhalangan hadir.

Asisten Satu Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, Ainun Amalia, menegaskan pentingnya netralitas panitia Pilkades. Ia mengingatkan bahwa panitia memiliki tanggung jawab penuh kepada BPD dan wajib menjaga sikap independen dalam setiap tahapan.

"Jika panitia melanggar aturan, sudah ada mekanisme kapan dan bagaimana mereka dapat diberhentikan. Pelanggaran prinsip netralitas tidak bisa ditoleransi," tegas Ainun.

Ia juga mendorong penguatan komitmen melalui penandatanganan fakta integritas agar Pilkades berlangsung jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Kami minta panitia menyelenggarakan Pilkades secara baik, jujur, transparan, dan akuntabel," tambahnya.



Petugas Pemkab Sidoarjo ketika Monev Pilkades di Sidokeping.

Di akhir sambutan, Ainun menyampaikan ucapan Idulfitri dan permohonan maaf lahir batin kepada seluruh peserta monev.

Sementara perwakilan Kejari Sidoarjo bidang Jaga Desa, Wakhid, menekankan pentingnya objektivitas panitia dalam menjaga kelancaran pemilihan.

"Pilkades yang aman dan demokratis sangat bergantung pada kepatuhan panitia terhadap aturan di setiap tahapan. Aparat penegak hukum bertugas mengawasi dan mendampingi agar proses berjalan baik," ujarnya. Wakhid juga mengingatkan pentingnya pendekatan persuasif, koordinasi, serta dokumentasi yang lengkap dalam menangani potensi masalah. Ia meminta pemilih dan tim sukses tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, serta menegaskan perlunya kehadiran saksi di setiap proses terutama saat penghitungan suara. "Semua ini demi menjaga integritas pemilihan," pungkasnya. (yah)

Gubernur Khofifah Tunjuk Plt Kadis ESDM, Pejabat Lama Terseret Kasus Korupsi



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (ist)

SURABAYA, BN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk MHD. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Penunjukan Plt Kadis ESDM Jatim itu merujuk Surat Penunjukan Nomor 800/2506/204.4/2026 tanggal 17 April 2026.

Hal ini dilakukan me-

nyusul penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses perizinan pertambangan dan air tanah. Selain itu, dua ASN lainnya juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang saat ini ditangani oleh Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Pemerin-

tah Provinsi Jawa Timur menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung serta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. "Kita menyerahkan semua proses kepada APH. Karena ini proses sedang berjalan, kita menghormati proses yang sedang berjalan," ujar Khofifah di Surabaya.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penunjukan Plt Kepala Dinas ESDM Jatim merupakan langkah administratif yang dilakukan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor energi dan sumber daya mineral yang memiliki peran strategis.

"Penunjukan Plt ini penting agar seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan, termasuk pelayanan perizinan dan fungsi pengawasan di

sektor ESDM," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, serta menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Kami terus mengingatkan seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi integritas. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai aturan," ujarnya.

"Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan tata kelola yang baik di seluruh sektor," pungkasnya. (dji)

INKA Kirim Puluhan Gerbong Datar Produksi Pabrik Banyuwangi ke Palembang



BANYUWANGI, BN – PT Industri Kereta Api (PT INKA) kembali mengirimkan 60 unit gerbong datar pesanan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk wilayah operasional di Palembang. Pengiriman ini dilakukan dari pabrik PT INKA di Banyuwangi.

Senior Manager Humas dan Kantor Perwakilan PT INKA (Persero), Hartono mengatakan, pengiriman ini merupakan rangkaian ke-14 (TS-14) dari total kontrak pengadaan sebanyak 1.125 unit gerbong datar antara PT INKA dan PT KAI.

"Seluruh proses produksi gerbong tersebut dikerjakan sepenuhnya di pabrik PT INKA Banyuwangi," terang Hartono, Jumat (10/4/2026).

Gerbong datar tersebut untuk memperkuat ekosistem logistik berbasis rel di Sumatera Bagian Selatan. Jenis gerbong tersebut dirancang untuk mengangkut kontainer, material konstruksi, hingga batu bara.

Diketahui, pengadaan gerbong ini telah dimulai sejak tahun 2025 lalu, menjadi bagian Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) KAI pada 2029 mendatang dalam Angkutan Barang.

Proses pengiriman, lanjut Hartono, dilakukan melalui jalur darat menggunakan 30 unit truk trailer. Estimasi waktu perjalanan menuju Palembang diperkirakan memakan waktu sekitar empat hari.

Pengiriman dilakukan secara bertahap sebanyak 60 gerbong per rangkaian sesuai dengan kesepakatan kontrak.

"Ini adalah pengiriman rangkaian ke-14 atau TS ke-14. Kami bersyukur, berkat doa dan dukungan masyarakat, sudah 14 TS berhasil dikirim ke Palembang," ujarnya.

PT INKA menargetkan dapat menyelesaikan pengiriman hingga 19 rangkaian atau setara 1.125 unit gerbong yang dikirim dari pabrik Banyuwangi ke Palembang pada pertengahan tahun ini. "Mohon doanya agar semua lancar dan PT INKA Banyuwangi semakin besar," harapnya. (Dj/Ydh)

Anniversary ke 1, Komunitas Vios Gen Satu Nusantara Korwil AG Raya

KEDIRI, BN – Penuh kebahagiaan dan kebersamaan mewarnai kegiatan halal bihalal sekaligus peringatan Anniversary ke-1 komunitas Vios Gen Satu Nusantara Koordinator Wilayah (Korwil) AG Raya, yang digelar 7 April 2026.

Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut berlangsung di kawasan wisata Umbalan Ploso dan dihadiri ratusan anggota komunitas beserta keluarga. Sejumlah perwakilan komunitas otomotif lain juga turut meramaikan kegiatan ini.

Momentum halal bihalal dimanfaatkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antar anggota, sekaligus



Foto bersama komunitas Vios Gen Satu Nusantara Koordinator Wilayah (Korwil) AG Raya. (Foto: ist)

memperkuat solidaritas dalam komunitas pecinta mobil Vios generasi pertama tersebut.

Ketua Korwil AG Raya, Alvian dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perjalanan satu tahun komunitas yang dinilai terus berkembang dan semakin solid.

Ia berharap ke depan komunitas ini dapat mem-

berikan kontribusi positif, baik di dunia otomotif maupun kegiatan sosial di tengah masyarakat. "Selain sebagai wadah pencinta mobil Vios generasi pertama, komunitas ini juga menjadi ruang kebersamaan dan persaudaraan yang bermanfaat," ujarnya. (Teddy Syah)

Polresta Banyuwangi Bongkar Sindikat Pengoplos LPG 3 Kg

BANYUWANGI, BN – Satreskrim Polresta Banyuwangi berhasil membongkar dua pengoplos gas LPG yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Kasus pertama yang diungkap adalah sindikat pengoplos LPG 3 Kg yang dijual lagi dalam kemasan tabung gas 12 Kg dan 50 Kg.

Sindikat yang digrebek pada Senin, 13 April 2026 di Dusun Ringinmulyo, Desa Ringintelu, Bangorejo, Banyuwangi itu terungkap sudah beroperasi selama 5 bulan, yakni dari Desember 2025 hingga Maret 2026.

Tiga tersangka diamankan dalam operasi tersebut, yaitu Suhariyono alias Poyo (55) yang berperan sebagai pemodal, Supardi alias Bodeng (47) sebagai eksekutor lapangan dan pemilik alat, dan Guntoro (71) sebagai jasa angkut.

Dalam praktiknya, sindikat tersebut menghabiskan 4.072 tabung LPG 3 Kg yang kemudian dijual dalam bentuk 1.000 tabung untuk 12 Kg dan 72 tabung untuk 50 Kg. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp220.931.520.

Hanya berselang 3 hari, Polresta Banyuwangi bergerak mengamankan oknum pangkalan resmi gas LPG, Ramadhan Harus Alrasyid alias Rama (42) di Dusun Kalimati, Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuwangi pada 16 April 2026.

Rama merupakan pemilik atau pengelola pangkalan resmi Pertamina LPG M. Khuldori yang telah menyalahgunakan kuota resmi pangkalannya yang dibeli seharga Rp16.000 per tabung.

Kecurangan pangkalan miliknya ini sudah berjalan selama 1,5 tahun, dari Januari 2025 hingga April 2026 dan menghasilkan 1.600 tabung gas 12 Kg ilegal dengan menyedot isi dari 6.400 tabung gas 3 Kg.

Gas oplosan tersebut kemudian dijual dengan harga Rp140.000 per tabung, sehingga membuat kerugian negara sebesar Rp323.392.000.

Modus Operandi dan Jejaring Pemasaran

Kedua sindikat menggunakan metode yang identik dan terstruktur dalam menjalankan aksi kejahatannya, yaitu teknik injeksi atau penyuntikan.

Para pelaku memindahkan isi gas dari tabung 3 Kg (Subsidi) ke tabung 12 Kg dan 50 Kg (Non-Subsidi) menggunakan pipa besi/selang regulator. Mereka menggunakan metode gravitasi (tabung 3 Kg di atas, tabung besar di bawah) yang dikombinasikan dengan pendinginan es balok pada tabung sasaran untuk mempermudah aliran gas.

Setelah memindah isi tabung gas, pemalsuan segel (barcode) dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Pelaku memasang segel atau barcode palsu menyerupai produk resmi (Bright Gas) yang dibeli secara



Barang bukti LPG yang diamankan Polresta Banyuwangi. (ist)

bebas melalui e-commerce (Shopee) dari penjual di luar daerah, yaitu dari Garut dan Bandung.

Hasil oplosan kemudian didistribusikan ke puluhan toko pelanggan tetap atau kluster di berbagai kecamatan di wilayah selatan Banyuwangi, seperti Muncar, Pesanggaran, Gambiran, Purwoharjo, Tegalsari, dan Sempu.

Barang Bukti yang Diamankan

Dari kedua Tempat Kejadian Perkara (TKP) utama maupun jaringan tokonya, penyidik berhasil menyita barang bukti krusial antara lain kendaraan operasional berupa 1 Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up (P-425-ZN) dan 2 Unit Motor Roda Tiga merek VIAR di mana salah satu bernopol P-5611-OBJ dan lainnya satu tanpa nopol.

Tabung gas ratusan unit turut diamankan dan terdiri dari ratusan tabung LPG 3 Kg kosong, puluhan tabung Bright Gas 12 Kg, baik kosong maupun berisi gas oplosan, dan tabung gas 50 Kg.

Polisi juga menyita alat yang digunakan untuk pengoplosan, di antaranya set pipa besi penyuntik aktif maupun cadangan, selang regulator, kain gombal, serta belasan tutup segel tabung gas palsu.

Alat komunikasi dan uang masuk dalam deretan barang yang disita, terdiri dari 3 unit Handphone yang digunakan untuk operasional dan membeli alat/segel secara online, nota penjualan, serta uang tunai hasil transaksi.

Pasal yang Disangkakan dan Tindak Lanjut Polresta Banyuwangi

Para tersangka dijerat dengan sanksi pidana tegas atas pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

Saat ini, penyidik Satreskrim Polresta Banyuwangi tengah melakukan pemberkasan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dan terus melakukan pendalaman serta pengembangan kasus, khususnya memburu jaringan penyedia segel palsu yang beroperasi secara online.

Polresta Banyuwangi juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dan melaporkan ke pihak berwajib jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait distribusi maupun indikasi pengoplosan LPG di lingkungan sekitarnya. (Spt/Sgg/Ydh)

Bunda Nanik Respon Langsung Terkait Sorotan Banjir dan TMII

MAGETAN, BN – Nanik Sumantri, Bupati Magetan merespon terkait berbagai isu yang berkembang di masyarakat dengan jawaban secara terbuka atas surat terbuka warga dengan menegaskan bahwa, komitmen pemerintah daerah Magetan demi meluruskan disinformasi sebagai bentuk dalam membangun Keterbukaan Informasi Publik.

"Kritik dan beragam opini dari masyarakat sesuatu hal yang wajar dalam proses demokrasi dan dapat sebagai nilai yang berbentuk partisipasi publik yang perlu diapresiasi. Bahkan, hal tersebut dinilai sebagai bentuk partisipasi publik yang patut diapresiasi," kata bunda Nanik dalam surat terbukanya.

"Ruang demokrasi dan transparansi di Magetan masih berjalan dengan baik," ucapnya, Sabtu (11/4/2026).

Beliau menjelaskan, respons pemerintah bukan sekadar reaksi, melainkan upaya menghadirkan komunikasi yang terbuka dan berimbang. Tujuannya, agar masyarakat mendapatkan informasi utuh serta terhindar dari informasi yang menyesatkan.

Evaluasi Menyeluruh Pascabanjir

Pengaruh banjir yang telah melanda sejumlah wilayah, bunda Nanik pun memastikan pemkab telah melakukan evaluasi menyeluruh. Beragam timbulnya banjir dari berbagai faktor penyebab, yaitu; Alam, Teknis dan perilaku manusia.

Pembka Magetan sigap dengan menyiapkan langkah penanganan jangka pendek, menengah, hingga panjang. Di antaranya penataan sistem irigasi dan drainase, serta penegakan aturan pemanfaatan lahan. "Semua solusi tidak bisa dilakukan sekaligus. Ada skala prioritas yang harus dijalankan," jelasnya.

Meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi semua pihak, pemerintah memastikan penanganan dampak banjir terus berjalan. Bahkan, seluruh permukiman terdampak dipastikan telah dibersihkan dari lumpur agar aktivitas warga bisa kembali normal.

Kegiatan TMII dan Forum Pawitan Dirogoh

Nanik pun menjelaskan polemik terkait kegiatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dijadwalkan berlangsung 17-19 April mendatang. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka gelar budaya dan promosi potensi daerah.

Selain itu, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan Forum Komunikasi Pawitan dirogoh yang melibatkan daerah Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo.

Lanjut beliau, kegiatan tersebut tidak sekadar seremoni saja, akan tetapi menjadi sarana promosi potensi daerah sekaligus memperkuat komunikasi dengan warga Magetan di perantauan.

"Ini juga ruang diskusi untuk mencari solusi pembangunan yang tidak bisa dibiayai APBD karena keterbatasan fiskal," ujarnya.

Beliau pun melanjutkan, kegiatan dilaksanakan secara sederhana, memanfaatkan fasilitas Anjungan Jawa Timur di TMII dan gedung milik TNI AU di Halim Perdanakusuma.

Terkait isu transparansi anggaran, Nanik menegaskan seluruh perjalanan dinas telah sesuai ketentuan. Di tengah kebijakan efisiensi, pemkab tetap selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan efektivitas kegiatan.

"Efisiensi bukan berarti meniadakan perjalanan dinas, tetapi lebih selektif dan rasional," pungkasnya.

Anggaran Kebencanaan Disiapkan

Dalam hal penanganan bencana, Pemkab Magetan telah mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) setiap tahun. Dana tersebut disiapkan sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi bencana. "Kita berharap anggaran itu tidak terpakai seluruhnya karena kita ingin Magetan dijauhkan dari bencana," tutur beliau.

Di akhir pernyataannya, bunda Nanik dengan tegas mengutarakan, seluruh kebijakan pembangunan diarahkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.

Pemerintah kata dia, ingin selalu hadir dalam setiap fase kehidupan warga, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. "Semangat kami, Magetan kumandang yen kabeh tumandang," pungkasnya. (Ashar)



Nanik Sumantri, Bupati Magetan (ist)

Proyek Koperasi Desa Rp1,6 M Tak Transparan, LPKM Minta APH Mengaudit



Ilustrasi

KAB. PEKALONGAN, BN - Lembaga Poros Keadilan Masyarakat (LPKM) Kabupaten Pekalongan menyoroti pelaksanaan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai belum memberikan hasil optimal. Kritik tersebut disampaikan melalui Sekretaris LPKM, Feri Erwansyah, pada Jumat (10/4/2026).

Menurut Feri, pembangunan gedung koperasi tersebut menaui sejumlah persoalan serius. Ia menilai pendekatan yang digunakan cenderung bersifat top-down dan minim

partisipasi masyarakat desa. Selain itu, penggunaan lahan publik seperti lapangan desa untuk pembangunan proyek juga disebut tidak melalui proses musyawarah yang memadai dengan warga setempat.

"Program ini terkesan dipaksakan dan terburu-buru, terutama dalam aspek pembangunan fisik dengan anggaran mencapai Rp1,6 miliar. Hal ini justru berpotensi melemahkan otonomi desa," ujarnya.

LPKM juga mengingatkan adanya risiko proyek mangkrak apabila peren-

canaan dan pelaksanaan tidak dilakukan secara matang. Lebih jauh, program tersebut dinilai membuka celah terjadinya praktik korupsi jika tidak diawasi secara ketat.

Temuan di lapangan memperkuat kekhawatiran tersebut. Di salah satu desa di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, LPKM menemukan adanya selisih signifikan dalam penggunaan anggaran. Dari total dana sebesar Rp1,6 miliar, pelaksanaan proyek disebut hanya menerima sekitar Rp 900 juta untuk pembangunan gedung koperasi.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait transparansi pengelolaan anggaran. "Pertanyaannya, ke mana sisa anggaran tersebut dialokasikan?" kata Feri.

Diketahui, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih menggunakan anggaran negara di bawah naungan PT Agrinas. Oleh

karena itu, LPKM menilai pengawasan publik menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.

Selama ini, lanjut Feri, pihaknya juga menerima berbagai laporan dugaan keterlibatan oknum dalam proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, transparansi pelaksanaan proyek serta kualitas material bangunan juga dipertanyakan oleh masyarakat.

"Jangan sampai pembangunan ini menjadi ajang bancakan. Jika memang ada indikasi penyimpangan, kami akan terus mengawal hingga tuntas," tegasnya.

LPKM pun mendesak pihak terkait untuk membuka secara jelas rincian penggunaan anggaran serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, guna memastikan program koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa.

(dikin)

Wali Kota Banjar : Mobil Maskara Boleh Dimanfaatkan untuk PAD Desa

KOTA BANJAR, BN - Wali Kota Banjar Haji Sudarsono akhirnya angkat bicara terkait polemik pemanfaatan mobil Maskara berplat merah yang selama ini banyak dikeluhkan karena tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dalam pertemuan bersama awak media pada Kamis (16/4/2026) di kantor Wali Kota Banjar, Haji Sudarsono menegaskan bahwa kendaraan dinas tersebut diperbolehkan untuk dimanfaatkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), khususnya bagi unit yang selama ini mangkrak atau tidak digunakan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong agar aset pemerintah tidak dibiarkan terbengkalai tanpa manfaat.

"Kita mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat. Mobil Maskara yang mangkrak dan tidak dipakai boleh dimanfaatkan, asalkan untuk kepentingan desa dan bisa meningkatkan PAD," tegasnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan kendaraan tersebut harus tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku. Penggunaan mobil dinas tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan wajib berada dalam pengawasan pemerintah desa maupun pemerintah daerah.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini kurang produktif. Dengan pemanfaatan yang tepat, mobil Maskara diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi desa.

Namun demikian, di lapangan masih diperlukan pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak menimbulkan potensi penyimpangan, mengingat status kendaraan tersebut merupakan aset negara yang penggunaannya diatur secara jelas dalam regulasi.

Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah berharap desa-desa di Kota Banjar dapat lebih inovatif dalam menggali potensi PAD tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat maupun daerah. (Asep sujana)



Wali Kota Banjar Haji Sudarsono. (ist)

Pererat Silaturahmi, SMPN 2 Garawangi Gelar Halal Bihalal

KUNINGAN, BN - Memasuki momentum pasca-Lebaran, SMP Negeri 2 Garawangi menggelar acara Halal Bihalal yang penuh kekeluargaan pada Selasa (14/04/2026). Bertempat di halaman depan sekolah, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga kekompakan seluruh elemen pendidikan di lingkungan sekolah.

Acara ini terasa istimewa karena dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Kuningan, Elon Carlan, serta Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana, M.Pd. Kehadiran para tokoh pendidikan ini memberikan motivasi tersendiri bagi para guru dan staf yang hadir.

Dalam sambutannya, Kepala SMPN 2 Garawangi, Dewi Pramukawati, S.Pd, menekankan bahwa esensi dari Halal Bihalal adalah pembersihan hati untuk memulai semangat kerja yang baru. Dirinya menyampaikan bahwa nilai-nilai kebersamaan harus menjadi napas dalam setiap kegiatan belajar mengajar.

"Kegiatan ini bukan sekadar tradisi rutin tahunan. Lebih dari itu, ini adalah sarana edukasi bagi siswa



Kadisdikbud Kuningan, Elon Carlan, serta Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana, M.Pd, saat Halal Bihalal SMP Negeri 2 Garawangi.

untuk membangun karakter yang santun, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan," ungkap Dewi.

Kepala Sekolah juga mengajak seluruh tenaga pendidik dan staf untuk terus menjaga soliditas. Menurutnya, lingkungan sekolah yang harmonis akan berdampak langsung pada kenyamanan

siswa dalam belajar, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan prestasi sekolah.

Di akhir, melalui momen ini, Dewi berharap SMPN 2 Garawangi dapat terus konsisten menciptakan lingkungan sekolah yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki ikatan sosial yang kuat.

"Keluarga besar SMPN 2 Garawangi berkomitmen untuk kembali fokus menjalankan tugas kependidikan dengan semangat baru, demi mewujudkan visi sekolah yang Harmonis, Nyaman, dan Berprestasi," pungkasnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan acara berlangsung dengan lancar dan khidmat. Setelah rangkaian sambutan, acara ditutup dengan sesi bersalaman sebagai simbol saling memaafkan antar warga sekolah, mulai dari jajaran pimpinan, guru, hingga staf tata usaha. (Ed)

Diduga Ada Belatung dalam Menu MBG di SMA Negeri 1 Pekalongan, Ini Kata Ketua LSM Robinhood



Dugaan adanya belatung dalam menu program MBG di SMA Negeri 1 Pekalongan. (Dikin)



Awak media berupaya konfirmasi ke pihak Kepala SPPG Kalibaras, Sabtu (18/4/2026). (Dikin)

PEKALONGAN, BN - Dugaan adanya belatung dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 1 Pekalongan menjadi sorotan publik setelah foto makanan tersebut viral di grup WhatsApp. Menu yang diduga ada belatungnya tersebut diketahui berupa bakso yang disajikan kepada siswa saat jam istirahat. Pihak sekolah membenarkan kejadian

tersebut setelah dilakukan pengecekan internal. Wahid, Kepala SMA Negeri 1 Pekalongan saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa peristiwa itu memang terjadi dan telah dilaporkan kepada pihak terkait. "Informasi terkait menu MBG yang terdapat belatung memang benar. Kejadiannya kemarin pada menu bakso saat jam istirahat," ungkap Wahid melalui sambungan telepon, Jumat (17/4/2026).

Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak sekolah bersama wali murid segera mengambil langkah dengan membuat laporan resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) serta Ketua DPRD dan dinas terkait.

Selain itu, sekolah juga mengajukan pergantian penyedia layanan makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai kurang profesional. Sebagai langkah antisipasi, distribusi MBG ke sekolah untuk sementara dihentikan hingga ditemukan penyedia pengganti. Direncanakan, penghentian berlangsung hingga 20 April 2026.

"Untuk sementara pengiriman MBG dihentikan sampai ada pengganti SPPG yang baru. Ada empat siswa yang sempat mengonsumsi makanan tersebut hingga mengalami muntah-muntah, dan langsung ditangani oleh pihak Puskesmas Pekalongan Timur yang langsung datang ke lokasi," jelasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Robinhood Pekalongan Raya, Arif menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melaporkannya kepada Ketua Satgas MBG Pekalongan serta Badan Gizi Nasional dan Ketua DPRD selaku pengawasan.

"Kami sebagai perwakilan masyarakat akan segera melaporkan SPPG di Kalibaras terkait temuan ini agar ada evaluasi menyeluruh," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, awak media telah melakukan upaya konfirmasi ke pihak Kepala SPPG Kalibaras, Sabtu (18/4/2026). Namun baik kepala maupun pemilik (owner) belum dapat ditemui karena tidak berada di tempat dan hanya bertemu pihak penjaga pintu gerbang. (Dikin)

BPJS Ketenagakerjaan Buka Rekrutmen Karyawan

PEKALONGAN, BN - BPJS Ketenagakerjaan kembali membuka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk ikut mengambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia. Kesempatan tersebut diberikan melalui rekrutmen yang akan resmi dibuka sejak Sabtu (11/4/2026). Melalui laman rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id

Dalam rekrutmen kali ini, BPJS Ketenagakerjaan membuka sejumlah posisi, antara lain Customer Service Officer yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia serta Account Representative Perwakilan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan kinerja institusi sekaligus kontribusi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

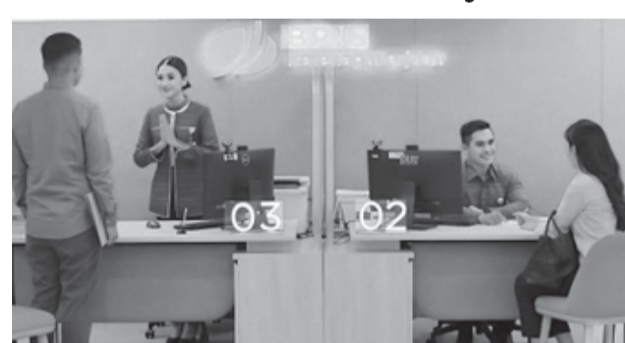
"Penguatan SDM ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan dekat dengan peserta, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia," un-

kap Harjono Siswanto. Ia menjelaskan bahwa langkah ini selaras dengan fokus strategi 3C (Cakupan, Kepedulian, dan Kredibilitas). Dari sisi Cakupan, penambahan SDM akan mendorong peningkatan cakupan kepesertaan melalui luasan jangkauan layanan, khususnya bagi pekerja informal dan sektor rentan.

Dari sisi Care, kehadiran talenta baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, empati, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Sementara itu, pada aspek Credibility, proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan profesional menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti proses seleksi.

"Ini menjadi bagian dari komitmen kami terhadap kesetaraan kesempatan. Kami meyakini bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan meraih cita-



Rekrutmen Karyawan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan. (ist)

cita," tambah Harjono.

Pada kesempatan yang sama Widhi kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan menyambut baik adanya program upah karyawan baru dengan tujuan adanya penguatan kinerja institusi sekaligus kontribusi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

"Sudah hampir tiga tahun lebih BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan penerimaan karyawan baru, dengan adanya program rekrutmen tahun ini diharapkan kami dapat selalu menghasilkan bibit pekerja unggul dengan penguatan SDM yang dapat menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan lebih dekat dengan peserta, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia," jelas Widhi Kepala BPJS Ketenagakerjaan.

■ Bersambung ke hal. 11 kol. 5

SMK Bhakti Kencana Pamanukan Sambut Baik Kunjungan Wakil Ketua AWP

SUBANG, BN - SMK Bhakti Kencana Pamanukan menyambut hangat kunjungan Wakil Ketua Aliansi Wartawan Pantura (AWP), M. Tohir, bersama sejumlah awak media dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkuat sinergi antara insan pers dan dunia pendidikan.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh pihak sekolah dalam suasana penuh keakraban. Agung selaku TU Kesiswaan menyampaikan bahwa SMK Bhakti Kencana merupakan sekolah swasta yang terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa.

"Kami sangat mengapresiasi kehadiran AWP yang telah berkunjung ke sekolah kami. Ini merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan terhadap dunia pendidikan," ujar Agung saat ditemui awak media.

Ia menambahkan, suasana lingkungan sekolah yang kondusif membuat para siswa merasa betah dan nyaman dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. "Alhamdulillah, dengan lingkungan yang ada saat ini, siswa di SMK Bhakti Kencana merasa kerassan dan lebih fokus dalam belajar," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua AWP, M. Tohir, mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara media dan



M. Tohir saat mengunjungi SMK Bhakti Kencana Pamanukan. (ist)

lembaga pendidikan, sekaligus menggali informasi secara langsung mengenai kondisi sekolah di wilayah Pamanukan.

"Kami berharap kehadiran AWP dapat menjadi jembatan informasi serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan pendidikan, khususnya di SMK Bhakti Kencana Pamanukan," ungkapnya.

Kegiatan diakhiri dengan diskusi ringan dan ramah tamah antara pihak sekolah dan awak media, sebagai bentuk memperkuat komunikasi serta membuka peluang kerja sama ke depan. (M.tohir/Sumantri)

Bupati Jombang Warsubi Hadiri HPN 2026

□ Pentingnya Pers Sehat dan Strategi Adaptif, Tetap Konsisten Pada Era Digitalisasi



Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi saat menghadiri Malam Resepsi Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan PWI Jombang Award Tahun 2026 di Yusro Hotel Jombang.

JOMBANG, BN - Kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda sebelumnya. Pada acara memperingati Hari Pers Nasional (HPN), berbagai kegiatan dilakukan. Pada acara tersebut, Bupati Jombang, H. Warsubi, S.H., M.Si., bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Yuliati Nugrahani Warsubi hadir langsung dalam Malam Resepsi Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dan PWI Jombang Award Tahun 2026 yang digelar di Yusro Hotel Jombang, Rabu (08/04/2026) malam.

Saat itu juga Bupati Jombang Warsubi memberikan apresiasi terhadap eksistensi PWI Jombang. "Saya memberikan apresiasi dan menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh PWI Kabupaten Jombang setiap tahunnya, sebagai pengingat akan pentingnya peran pers sebagai

pilar keempat demokrasi, yang berfungsi sebagai pengawas, penyedia informasi, penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, serta berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Bahwa, terkait tema "Pers Sehat dan Berdaya: Strategi Adaptif, Kreatif, serta Inovatif untuk Tetap Konsisten pada Era Digitalisasi", Bupati menyoroti pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat akibat perkembangan media sosial. Ia mengingatkan bahwa kecepatan informasi sering kali tidak dibarengi dengan verifikasi yang memadai.

"Informasi mengalir begitu cepat, real-time, dan sering kali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Setiap individu dapat berperan sebagai 'produsen berita'. Kondisi ini tentu berpotensi memunculkan hoaks, disinformasi, serta polarisasi di ruang publik," tandasnya.

Disampaikan oleh Bupati, bahwa pentingnya integritas bagi para jurnalis agar tidak hanyut dalam arus digitalisasi yang destruktif. "Dibutuhkan insan pers yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap

menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, sehingga mampu menjaga kualitas informasi dan tetap konsisten di era digitalisasi tanpa kehilangan makna dan nilai-nilai jurnalistik," ujarnya.

Selain itu Bupati juga mengajak seluruh insan pers untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kondusivitas wilayah Jombang melalui pemberitaan yang bertanggung jawab dan berimbang. "Saya mengajak saudara sekalian untuk bersama-sama memerangi hoaks dan disinformasi, serta menghindari pemberitaan yang tidak bertanggung jawab, karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Pada kesempatan itu juga telah diumumkan para nominasi dan penerima penghargaan PWI Jombang Award 2026. Untuk kategori Tokoh/Sosok Individu, penghargaan diberikan kepada Heri Purnomo sebagai Inisiator Sinergi Ekonomi Akuakultur Kabupaten Jombang, Didik Purwanto sebagai Pilar Pelestari Ludruk Kabupaten Jombang, serta Cak Ukil (Moh. Suluhil Amin) sebagai Kreator Inspirasi Milenial.

Selanjutnya untuk kategori Institusi/Lembaga/Komunitas, penghargaan diberikan kepada Pesantren Kaligrafi SAKAL melalui program "Paramartha Seni Religi Kabupaten Jombang" serta MAFINDO Jombang melalui "Pionir Navigasi Digital Kabupaten Jombang".

Pada sesi berikutnya PWI Jombang juga mengumumkan pemenang lomba dalam rangka HPN 2026. Pada lomba video, Juara I diraih Itham Dwi Adeyansyah, Juara II MAN 7 Jombang atas nama Aulia Iga Mawarti, dan Juara III

Muhammad Abdur Rosyid Ma'arif. Adapun pada lomba fotografi, Juara I diraih Ahmad Azmi Amiq, Juara II M. Azril Arifin, dan Juara III Evelyn Tan Mei Fang. Untuk kategori harapan, Harapan I diraih Aniatul Khamidah, Harapan II Navvaro Putra Baharuna, dan Harapan III Moch. Izzam Muzakki. Sedangkan peserta yang masuk 10 besar antara lain Arka Dewa Widiannanda, Candra Susila Adi Wibawa, Hafist Pratama, serta Muhammad Athaya Rafa Pratama.

Untuk itu pada suasana bulan Syawal, Bupati menutup sambutannya dengan harapan agar silaturahmi yang terjalin dapat mempererat kebersamaan dalam membangun daerah.

Perlu dipahami, bahwa momentum PWI Jombang Award 2026 ini, diharapkan sinergi antara pers dan Pemerintah Kabupaten Jombang semakin kuat demi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

Pada acara tersebut hadir juga dari jajaran Forkopimda Kabupaten Jombang, Sekretaris Daerah Agus Purnomo, S.H., M.Si., Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid dan pengurus serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Perlu diketahui, bahwa Peringatan HPN 2026 menjadi momentum refleksi penting bagi insan dan perusahaan pers untuk meneguhkan kembali perannya di tengah perubahan lanskap media yang kian kompleks. Selain itu bahwa HPN bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan ruang evaluasi bagi dunia pers agar mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai pilar demokrasi. (Tok/Adv)

Launching Bantuan Pangan Desa Puri Semanding, Dihadiri Bupati Jombang Warsubi

JOMBANG, BN - Pada Launching bantuan pangan oleh pemerintah adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpendapatan rendah, mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga pokok, serta memastikan aksesibilitas pangan bagi keluarga penerima manfaat.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Jombang resmi meluncurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng alokasi bulan Februari dan Maret tahun 2026.

Pada acara Launching Bantuan Pangan yang dipusatkan di Balai Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan (Jumat siang, 10/4/2026), dipim-

pin langsung oleh Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si, Perwakilan Forkopimda, seraf Muhammad Husin, S.H., M.H., Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto.

Pada sambutannya, Bupati Warsubi menegaskan bahwa Program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden RI guna memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat, serta upaya strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi rakyat.

"Penyaluran bantuan pangan ini dilaksanakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima, serta sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangan-

ni kerawanan pangan, serta mengendalikan gejala harga dan inflasi," ujar Bupati Jombang.

Pada bantuan yang telah disalurkan itu mencakup dua komoditas utama, yaitu 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per Penerima Bantuan Pangan (PBP) untuk setiap bulannya. Mengingat alokasi ini mencakup periode Februari dan Maret, masyarakat menerima bantuan tersebut sekaligus dalam satu kali penyaluran.

Selain itu untuk penerima bantuan ini merujuk pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Untuk wilayah Kabupaten Jombang, total terdapat 207.858 penerima yang tersebar di 21 kecamatan

dan 306 desa.

Sedangkan untuk secara khusus pada Kecamatan Plandaan, tercatat sebanyak 8.249 PBP, di mana 910 di antaranya merupakan warga Desa Purisemanding.

Saat itu juga Bupati Warsubi menyampaikan untuk proses distribusi di lapangan berjalan tanpa kendala teknis dan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Beliau menginstruksikan jajaran camat hingga kepala desa untuk terjun langsung mengawal proses tersebut.

"Saya mengharapkan agar penyaluran bantuan pangan ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tepat sasaran. Saya juga mohon peran aktif dari para Camat dan Kepala Desa untuk turut melakukan penga-

wasan dan pendampingan di lapangan," tandasnya.

Saat itu juga disampaikan Muhammad Husin, S.H., M.H., Pimpinan Perum BULOG Kantor Cabang Mojokerto, mengatakan, "Bahwa program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng ini merupakan instruksi langsung dari Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo Subianto. Badan Pangan Nasional telah menugaskan Perum BULOG untuk mendistribusikan bantuan ini bagi alokasi bulan Februari dan Maret 2026," ujarnya.

"Mungkin Bapak dan Ibu bertanya mengapa alokasi Januari tidak ada. Perlu kami sampaikan bahwa program ini menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi anggaran Pemerintah Pusat. Untuk saat ini,



Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si saat Launching Bantuan Pangan Desa Puri Semanding, Kecamatan Plandaan Jumat siang (10/4/2026). (ist)

bantuan baru dicairkan untuk dua bulan tersebut," ungkapnya.

Selain itu, bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. "Tujuan utama dari bantuan pangan ini adalah mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan, yang merupakan salah satu poin dalam

Asta Cita Presiden Prabowo Subianto demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," ujarnya.

Agar diketahui, bahwa bantuan ini sering kali ditargetkan untuk disalurkan secara tepat sasaran agar dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat lebih optimal.

(Tok/Adv)

Bupati Jombang Warsubi Ajak IKAPTK Jombang Jadi Penggerak Inovasi Birokrasi



Keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Jombang saat acara "Silaturahmi & Halal Bihalal" yang dihadiri oleh Bupati Jombang, Warsubi. (ist)

JOMBANG, BN - Agar diketahui bahwa semangat kekeluargaan adalah nilai luhur berbasis rasa kemanusiaan, solidaritas dan renggang rasa, dimana individu saling membantu dan menghormati layaknya saudara. Suasana itu telah menyelumuti aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang pada Sabtu, siang 11/04/2026), saat itu Keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Jombang menggelar acara "Silaturahmi & Halal Bihalal" yang dihadiri oleh Bupati Jombang, Warsubi S.H., M.Si., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ibu Yuliati

Nugrahani Warsubi.

Pada pertemuan yang diawali dengan santunan anak yatim ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara para purna praja (APDN, IIP, STPDN) dan praja IPDN yang bertugas di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Tampak hadir dalam acara tersebut Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si didampingi Ketua DWP Kabupaten Jombang Lilik Agus Purnomo, Wakil Bupati Jombang periode 2013-2018 Drs. Widjono Soeparno Msi, hadir beserta istri, Wakil Ketua DPN-IKAPTK sekaligus Wakil Ketua 1 DPP-IKAPTK Provinsi Jawa Timur, Drs. Purwanto, M.KP, Ketua Umum DPK-IKAPTK Kabupaten Jombang, Drs. Anwar, MKP, para purna praja APDN, IIP, STPDN, dan para praja IPDN di Kabupaten Jombang.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Jombang, Saya menyampaikan minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga halal bihalal ini dapat menjadi penguat semangat persaudaraan, kebersamaan, kekompakan, dan keharmonisan di antara kita semua. harapannya, segala upaya dan kerja kita bersama selama ini dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah," ujar Bupati Jombang Warsubi.

Seketika itu Bupati Warsubi memberikan apresiasi atas kontribusi nyata yang diberikan alumni IKAPTK bagi pembangunan Kabupaten Jombang. Beliau menekankan bahwa lulusan sekolah kedinasan di bawah Kemendagri dicetak khusus untuk menjadi pemimpin dan panutan dalam birokrasi.

Saat itu juga Bupati Warsubi menyampaikan motivasi kepada

seluruh yang hadir untuk terus belajar, dan meningkatkan kapasitas diri. "Sebab tantangan ke depan semakin kompleks, jadi kita juga harus semakin siap. Yang tidak kalah penting, tetap jaga integritas dan semangat pengabdian. Jadilah penggerak, ambil bagian, beri kontribusi nyata. Tunjukkan bahwa saudara bisa diandalkan dalam proses pembangunan dan pelayanan publik demi "Mewujudkan Jombang yang Maju dan Sejahtera untuk Semua," tutur Bupati Jombang.

Disaat suasana yang hangat terasa saat Bupati Warsubi berbagi pengalaman hidup. Beliau menceritakan perjalanan kariernya, hingga menjadi Kepala Desa, sebelum akhirnya diberikan amanah menjadi Bupati.

Saat itu juga Wakil Ketua 1 DPP IKAPTK Jawa Timur, Drs. Purwanto, M.KP., mengungkapkan bahwa kehadiran alumni pendidikan kepamongprajaan di Jombang sangat signifikan. Mereka siap untuk mendukung visi misi Bupati Jombang.

"Alumni kami dicetak melalui pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan selama 24 jam di asrama. Hal ini membentuk mental yang matang dan siap membantu pimpinan dalam menjalankan visi-misi daerah," ujar Purwanto.

Di acara yang berlangsung masih di bulan Syawal ini ditutup dengan ramah tamah, bersalaman dan saling memaafkan. Karena dari itu pada kegiatan ini, IKAPTK Jombang diharapkan terus solid menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional, berintegritas, dan inovatif bagi kemajuan Kabupaten Jombang. Acara tersebut adalah merupakan bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang mengutamakan kerukunan dan persatuan. (Tok/Adv)

115 ASN Terima SK Pensiun Dari Bupati Jombang



Agus Supriyanto S.H.M.Si Sekcam Bareng terima SK Purna Tugas dari Bupati Jombang. (ist)

JOMBANG, BN - Penyerahan Surat Keputusan (SK) Purna Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki makna yang mendalam baik secara administratif maupun emosional. Beberapa minggu lalu BKPSDM Pemkab Jombang telah menggelar Penyerahan SK Purna Tugas bagi PNS TMT 1 April hingga 1 Juni 2026. Acara berlangsung di Ruang Bung Tomo Kantor Pemkab Jombang, (Rabu, 15/4/2026).

Pada penyerahan SK tersebut secara simbolis dilakukan Bupati Jombang Abah Warsubi didampingi Sekdakab Agus Purnomo, dan Kepala

■ Bersambung ke hal. 11 kol. 1

Silaturahmi Guru TPQ Dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Jombang



Silaturahmi Bersama Guru TPQ Penerima Insentif se-Kabupaten Jombang 2026, yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang. (ist)

JOMBANG, BN - Silaturahmi bersama guru TPQ (Taman Pendidikan Alqur'an) penerima insentif memiliki beberapa hikmah dan dampak positif, baik guru ngaji maupun pemerintah/ lembaga pemberi bantuan berdasarkan praktik di berbagai daerah.

Sehingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang telah menaikkan insentif bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (IPQ) pada tahun 2026 sebagai upaya memperkuat

■ Bersambung ke hal. 11 kol. 5

Publikasi Bapperida Kabupaten Bogor Bapperida dan YRII Kolaborasi Tuntaskan Kemiskinan Dengan Skema Graduasi



BOGOR, BN -Peningkatan kemiskinan menjadi tugas penting dalam suatu daerah guna menjadi tolak ukur keberhasilan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen menuntaskan persoalan tersebut.

Penyelesaian masalah kemiskinan telah menjadi program prioritas di kepemimpinan Bupati Rudy Susanto bersama Wakil Bupati Ade Ruhandi, dengan memperkuat pelaksanaan skema 'Graduasi Keluarga Miskin Ekstrem' melalui pilar perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.

Pemkab Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) telah menggandeng Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) selanjutnya dikenal sebagai Islamic Relief, organisasi kemanusiaan yang telah malang melintang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin selama 40 tahun di 40 negara.

Penguatan dan percepatan program ini dilaku-

kan dalam kegiatan 'Peningkatan Upaya Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dan Lembaga dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Graduasi' di Ruang Rapat Ciliwung Kantor Bapperida Kabupaten Bogor, Kamis (9/4/2026).

Kepala Bapperida Kab Bogor, Dr. Bambang Setia Aji, ST., M.BA yang diwakilkan oleh Sekretaris badan Bapperida Titi Sugiarti, ST di dampingi oleh kepala Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Tika Effendi menyampaikan, Pendekatan Graduasi kemiskinan menjadi sangat relevan karena tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi memastikan masyarakat memiliki akses pada sumber penghidupan dengan mendapat pendampingan intensif dan memiliki ketahanan ekonomi dan sosial, sehingga mampu keluar secara permanen dari kemiskinan.

"Jadi pendekatan yang dilakukan bukan lagi bersifat parsial, tetapi harus holistik, terintegrasi, dan berbasis graduasi," katanya dalam keterangan resmi yang diterima media.



Dengan begitu, setiap program lintas perangkat daerah harus sinkron, dan menjadikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai orkestrator penanggulangan. Sehingga mendorong konvergensi intervensi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Serta memastikan setiap intervensi yang dilakukan memiliki target sasaran yang jelas dan terukur.

Titi Sugiarti pun menekankan langkah kunci untuk memaksimalkan program tersebut, seperti pemuktahiran dan integrasi data kemiskinan sebagai basis perencanaan, penajaman target sasaran rumah tangga miskin ekstrem, integrasi program OPD ke dalam skema graduasi yang berkelanjutan.

"Dan yang tak kalah penting adalah penguatan monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome), serta pembangunan kolaborasi multipihak (pentahelix) yang lebih kuat," papar dia.

Sejauh ini Pemkab Bogor juga telah melakukan beberapa program guna menurunkan tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin dan rentan miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang menyerap sebagian besar pengeluaran.

Seperti pada bidang kesehatan, dengan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Plus untuk rumah tangga miskin, beasiswa pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, serta sekolah rakyat. Lalu, Bidang Kesehatan seperti memberikan jaminan ke-

sehatan nasional, Jamkesda terintegrasi BPJS, program posyandu plus dan peningkatan gizi.

Selanjutnya pada Bidang Sosial, Pemkab Bogor telah mengucurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), program perlindungan sosial berbasis komunitas. Di Bidang Administrasi yaitu, program jemput bola administrasi kependudukan gratis. Bidang Keluarga Berencana (KB) ada program KB gratis dan layanan kesehatan reproduksi.

Adapun data sasaran graduasi kemiskinan sebanyak 3200 dan dimulai dilaksanakan intervensi tahun 2026. Data sasaran diperoleh dari verifikasi pendamping Program Keluarga Harapan. Dengan kolaborasi bersama Yayasan Relief Islami Indonesia ditargetkan terjadi penuru-

nan kemiskinan di Bumi Tegar Beriman.

Patut diketahui Yayasan Relief Islami Indonesia memiliki bidang kerja meliputi Air-Sanitasi-dan Higiene (WASH), Mata Pencaharian Berkelanjutan, Kesejahteraan Anak, Shelter, Pengendalian Perubahan Iklim, Manajemen Risiko Bencana, Kesehatan dan Gizi, dan Bantuan Musiman (Paket Ramadan, Paket Ied, dan Paket Kurban).

CEO Yayasan Relief Islami Indonesia, Nanang Subara Dirja menegaskan telah membuat memetakan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bogor, serta membuat konsep program untuk melakukan penanganan yang tepat dan terukur.

"Strategi program yang sudah kami siapkan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kegiatan ekonomi (IGAs), pemberdayaan sosial, dan peningkatan kondisi sosial ekonomi," jelasnya.

Ada beberapa tahapan implementasi yang akan dilakukan, pembentukan kelompok swadaya atau Self Help Group (SHG). Yang nantinya kelompok tersebut akan dilakukan pelatihan, asesmen kapasitas, hingga fasilitas pertemuan.

Tak berhenti sampai disana, kata Nanang Subara Dirja nantinya akan pengembangan modul kegiatan menabung, dukungan bank makanan, dukungan pekarangan rumah. Dan selanjutnya, pengembangan modal dan usaha, yang akan diiringi pelatihan perencanaan, pemasaran dan pencatatan.

"Kami akan beri pendampingan terus dengan mentoring usaha per semester, yang didukung seorang ahli dalam penyusunan usaha, pelatihan teknis, hingga pengembangan jejaring atau pemasaran usaha," kata Nanang.

Adapun periode implementasi program yang telah dirancang Yayasan Relief Islam Indonesia sejak Desember 2025 hingga November 2027, dengan kolaborasi bersama beberapa OPD untuk mempercepat permasalahan kemiskinan.

Nanang Subara Dirja mengungkapkan, dampak yang diharapkan hingga November 2027, sebanyak 600 rumah tangga (2.400 individu) bisa lulus dari kemiskinan dengan meningkatnya skor konsumsi, mata pencaharian, kesejahteraan sosial, hingga pengembangan usaha. (adv/eml)



Dukung dan Sukseskan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sinjai Tahun 2026

Pemerintah Desa Terasa, Kec. Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai



Nasse, S.Ag
Kepala Desa

Pemerintah Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat - Kabupaten Sinjai



Sabri, S.Pd
Kepala Desa

Pemerintah Desa Bontolempangan Kec. Sinjai Barat - Kabupaten Sinjai



Sudirman, S.Ip
Kepala Desa

Pemerintah Desa Arabika, Kec. Sinjai Barat, KABUPATEN SINJAI



Harianto, S.E
Kepala Desa

Pemerintah Desa Mattunrung Tellue Kec. Sinjai Tengah - Kabupaten Sinjai



Ismail
Kepala Desa

Pemerintah Desa Bonto, Kec. Sinjai Tengah, KABUPATEN SINJAI



Sudirman, S.Ip
Kepala Desa

Pemerintah Desa Barambang Kec. Sinjai Borong - Kabupaten Sinjai



Bohari, S.E
Kepala Desa

Pemerintah Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong - Kabupaten Sinjai



Usbar
Kepala Desa

Pemerintah Desa Alenaka Kecamatan Sinjai Selatan- Kabupaten Sinjai



A. Ilyas
Kepala Desa

Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe - Kabupaten Sinjai



Asrul Arkan, S.Pd
Kepala Desa

Pemerintah Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur - Kabupaten Sinjai



Bustan, S.Ip
Kepala Desa

Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai



Andi Syarifuddin
Kepala Dinas

Kasus Dugaan Pungli Alsintan Mandek di Polres Soppeng, Ketua LSM Lapak Kecewa



Ketua dan para pengurus LSM Lapak Soppeng, (anwar p)

SOPPENG, BN - Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang dilaporkan oleh Ketua LSM Lapak, Sofyan, hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, nilai kerugian yang dilaporkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.

Sofyan mengaku kecewa terhadap penanganan kasus tersebut oleh Polres Soppeng yang dinilai berjalan lambat tanpa kepastian hukum. Ia menyebutkan bahwa seluruh barang bukti, termasuk rekaman percakapan serta dokumentasi foto Alsintan, telah diserahkan kepada pihak kepolisian. Selain itu, sejumlah kelompok tani juga telah dimintai

keterangan sebagai saksi. "Barang bukti sudah ada, saksi sudah diperiksa, tapi tidak ada titik terang. Ini yang membuat saya kecewa dengan kinerja Polres Soppeng," ujar Sofyan dalam keterangannya.

Menurutnya, dugaan pungli terjadi dalam proses penyaluran bantuan Alsintan kepada kelompok tani. Sejumlah kelompok disebut dimintai uang dengan dalih biaya administrasi atau pengurusan bantuan, dengan nominal berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp100 juta per kelompok. Uang tersebut diduga disetorkan atas nama seseorang berinisial RF.

Ironisnya, lanjut Sofyan, kelompok tani yang telah menyetor dana justru tidak menerima bantuan Alsintan. Bantuan tersebut

diduga dialihkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan finansial.

"Kelompok tani yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkan alat pertanian. Bantuan itu diduga dialihkan ke pengusaha yang memiliki uang," ungkapnya. Sofyan juga mengungkap bahwa dugaan praktik penyelewengan ini bukan hal baru, melainkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Ia pun mempertanyakan lambannya respons aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

Bahkan, Sofyan mengaku pernah mendampingi tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Soppeng melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi penyimpanan alsintan. Dari hasil penelusuran tersebut, ditemukan beberapa titik yang diduga menjadi lokasi pengalihan bantuan. Namun hingga kini, belum ada langkah hukum lanjutan yang tegas. "Yang membuat janggal, kami sudah turun langsung ke lokasi bersama tim Tipikor, tapi sam-

pai sekarang belum ada kepastian hukum," tambahnya.

Selain itu, Sofyan turut menyoroti sikap DPRD Soppeng yang dinilai belum menunjukkan respons serius terhadap persoalan ini. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan oknum legislatif dalam praktik tersebut.

"Saya mengingatkan, jangan sampai ada oknum DPRD yang terlibat. Jangan tutup mata hanya karena ada kepentingan. Jika terbukti, saya akan laporkan juga," tegasnya.

Sofyan berharap agar kasus ini mendapat perhatian dari aparat penegak hukum yang lebih tinggi, seperti Polda Sulawesi Selatan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan penanganan yang transparan dan tuntas.

"Rakyat kecil dirugikan. Bantuan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan petani justru dinikmati segelintir orang. Jangan biarkan kasus ini berhenti di tengah jalan," pungkasnya. (anwar p)

Kades Kaloling Dukung Pelayanan Imunisasi Campak dan Apresiasi Kader Kesehatan



Selasa, 14/4/2026.

Pemerintah desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sangat mengapresiasi program ini, tentunya ini demi meningkatkan kualitas dan kesehatan masyarakat.

"Imunisasi ini adalah investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi kita, kami berharap kepada orang tua agar untuk memanfaatkan kesempatan ini, sebagai langkah serius dalam mencegah penyakit campak," katanya.

Melalui kegiatan ini pemerintah desa Kaloling, Berharap cakupan imunisasi campak di wilayahnya terus meningkat, diharapkan kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan anak.

"Kami selaku pemdes, berterima kasih dan mengapresiasi kepada kader posyandu dan tenaga kesehatan yang telah mengunjungi desa kami untuk melakukan imunisasi campak," pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan penularan campak dilakukan deteksi dini dan terus berjalan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kesehatan demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tinggi, Posyandu Desa Kaloling menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya bagi balita sebagai generasi penerus bangsa. (As)

Pemdes Mattunrung Tellue Gelar Imunisasi Campak

□ Kades Ajak Ibu Lengkapi Vaksin Anak

SINJAI, BN - Pemerintah Desa Mattunrung Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, menerima kunjungan Puskesmas Lappadata menggelar imunisasi campak melalui program outbreak response immunization (ORI).

Kegiatan ini disambut hangat oleh Ismail kepala Desa Mattunrung Tellue, ia menyampaikan kepada warga bahwa imunisasi ini untuk melindungi anak-anak dari penyakit campak, kami pemdes sangat mengapresiasi program ini, Terutama tenaga kesehatan yang turun langsung memberikan pelayanan.

"Program ini menyasar kepada seluruh anak agar memiliki perlindungan menyeluruh terhadap campak, ini menjadi bagian dari strategi pengendalian wabah yang sedang berlangsung di beberapa daerah termasuk di Sinjai, Katanya kepada Bidik Nasional, Senin, 13/4/2026

Lanjut kata dia perlu diketahui bersama, Campak merupakan penyakit menular yang sangat mudah



Ismail kepala Desa Mattunrung Tellue saat Imunisasi Campak. (as)

menyebarkan melalui udara, terutama pada anak-anak dengan daya tahan tubuh rendah," tegasnya.

Diketahui Sebanyak 91 orang anak yang di imunisasi di Desa Mattunrung Tellue, diantaranya di kelompok bermain, Topala indah, Palampeng, Mattirowalie, sementara di Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri,

Batulappa dengan Topisi, sebanyak 44 anak yang sudah di Vaksin

Program ORI merupakan langkah respons terhadap meningkatnya kasus campak (KLB) tahun 2026, dengan sasaran anak usia 9-59 bulan tanpa melihat riwayat imunisasi sebelumnya. Upaya ini bertujuan meningkatkan kekebalan kelompok dan mencegah penyebaran campak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Sinjai Tengah Syahrul Paesa S. IP di dampingi Ketua TP. PKK Sinjai Tengah, Kepala puskesmas Hj. Mardiah, Ns, M.KM Kepala Pustu Desa Mattunrung Tellue Firsya Yunita, S. Keb. (Aswin)

Kader NasDem Sulsel Unjukrasa di Depan Monumen Mandala

MAKASSAR, BN - Kader NasDem se - Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis, (16/4/2026) sore. Dalam aksinya, seluruh kader NasDem dari 24 Kabupaten/Kota turun ke jalan. Mereka menuntut pemberitaan Majalah Tempo terkait isu Partai NasDem akan diakuisisi Partai Gerindra dengan judul "PT NasDem Indonesia Raya Tbk" edisi 12 April 2026.

Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan, Syahrudin Alrif, menyampaikan aksi unjuk rasa ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Ia menuntut, Majalah



Tempo menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaannya, serta melakukan klarifikasi.

"Ini penghinaan dan juga melakukan Berita kebencian terhadap Ketua Umum Partai Nasdem, Orang tua kami, Bapak Surya Paloh. Maka kami minta untuk minta maaf. Yang kedua, melakukan klarifikasi," kata Bupati Sidrap itu di sela aksi tersebut.

"Mengkritik boleh, memberikan masukan boleh. Tapi kalau sudah masuk pada wilayah-wilayah yang menjudge NasDem, ini diakuisisi, ini mau dijual. Itu tidak boleh. NasDem bukan perusahaan, NasDem ini melahirkan Kader-kader pemimpin di seluruh Indonesia, Khususnya di Sulawesi Selatan," sambung Syahrudin. Adapun narasi pembe-

rita Tempo yang memantik reaksi kader, kata Syahrudin, terkait dengan akuisisi Partai Nasdem. Kemudian Gambar Surya Paloh pada cover Majalah Tempo dianggap kurang bagus dan kurang etik.

"Maka tentu ini menjadi kemarahan bagi kader NasDem di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Aksi ini serentak di seluruh Indonesia dan di Sulawesi Selatan. Maka kita akan menunggu klarifikasi dan minta Dewan Pers untuk memberikan teguran. Menyampaikan saran pandangan boleh, tapi kalau menyerang secara personal dan lain-lain, saya kira itu tidak boleh," imbuhnya. (*sbr)

Pemkab Pinrang Tingkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan



Penyerahan pimpinan Puskesmas Cempa dan Puskesmas Sali-sali. (ist)

PINRANG, BN - Upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui langkah penyegaran organisasi di tingkat fasilitas layanan kesehatan.

Sebagai bagian dari langkah tersebut, dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Pinrang mengalami pergantian pimpinan, masing-masing Puskesmas Cempa dan Puskesmas Sali-sali.

Pergantian ini ditandai dengan penyerahan langsung Surat Keputusan (SK) oleh Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si., kepada dr. Abd. Azis yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskesmas Sali-sali dan kini dipercaya memimpin Puskesmas Cempa. Sementara itu, jabatan

■ Bersambung ke hal.11 kol.5

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pagar Alam Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah



PAGARALAM, BN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagar Alam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada 18.442 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebar di 5 Kecamatan

dan 35 Kelurahan. Bantuan CPP tersebut secara simbolis diserahkan Wali Kota Pagar Alam Ludi Oriansyah bersama Forkopimda Pagar Alam, di Kantor Camat Dempo Utara, Kamis (16/04/2026).

Adapun rincian penerima manfaat tersebut, di Pagar Alam Selatan sebanyak 5.803 KPM, Kecamatan Pagar Alam Utara 4.891 KPM, Kecamatan Dempo Utara 3.215 KPM, Kecamatan Dempo Tengah 2.240 KPM dan Kecamatan Dempo Selatan 2.293 KPM, masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan 20 Kg beras dan 4 Liter minyak goreng.

Bantuan pangan beras dan minyak goreng tersebut merupakan program Pemerintah Pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) / National Food Agency (NFA) yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mengurangi beban pengeluaran masyarakat rentan.

"Nantinya apabila masih ada warga yang belum dapat bantuan pangan tersebut, Pemkot Pagar Alam melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan berupaya mencari solusi terbaik, lewat alokasi APBD, BanGub dan lainnya demi ketentraman dan kesejahteraan kita bersama," kata Wali Kota.

Wali Kota Ludi juga mengatakan, sinergitas antar berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta unsur BUMN, TNI/Polri, Swasta, Organisasi dan Masyarakat dalam penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat terus di dorong, guna menciptakan kekuatan ketahanan pangan daerah.

"Melalui sinergi ini akan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan Semoga segala upaya yang telah kita laksanakan, selalu di ridhoi Allah SWT," harap Wali Kota. (teo)

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang Basmi OPT



Kegiatan pembasmian OPT dengan cara disemprot. (ist)

PINRANG, BN - Upaya pencegahan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pinrang guna menjaga produktivitas pertanian masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui penyemprotan pada lahan pertanian yang masih dalam tahap pertumbuhan dan belum terdampak serangan hama.

Langkah ini dinilai penting mengingat serangan OPT pada musim tanam kali ini telah berdampak pada penurunan produksi di sekitar 1.310 hektar lahan pertanian yang tersebar di beberapa kecamatan.

Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, S.I.P., M.Si., yang hadir langsung dalam kegiatan pengendalian tersebut, Kamis (16/4/2026) mengungkapkan optimismenya bahwa langkah ini mampu menekan dampak serangan hama jika dilakukan secara tepat, baik dari sisi waktu maupun dosis penggunaan.

"Upaya ini adalah bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian masyarakat. Jika dilakukan secara tepat, kita optimis dampak serangan OPT dapat diminimalisir sehingga produktivitas tetap terjaga," ungkap Wabup Sudirman.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa penurunan produksi pada lahan terdampak akan menjadi bahan evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Evaluasi ini diharapkan mampu melahirkan langkah-langkah antisipatif yang lebih cepat dan terukur. Wabup Sudirman juga menekankan pentingnya sinergitas antara petani, penyuluh pertanian, dan pemerintah sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di Kabupaten Pinrang. "Komunikasi dan kerjasama yang baik menjadi faktor penting. Dengan sinergi yang kuat, kita tidak hanya mampu mengatasi persoalan, tetapi juga mencegahnya sejak dini," tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, A. Sinapati Rudy, serta pihak terkait lainnya yang secara langsung mendampingi pelaksanaan pengendalian di lapangan.

Melalui langkah ini, diharapkan petani dapat terhindar dari potensi gagal panen, menjaga stabilitas hasil produksi, serta memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(*syabir/Han)

Bupati Labuhanbatu Berikan Doa Terbaik Untuk Calon Jamaah Haji dari Dinas Pendidikan

LABUHANBATU, BN - Bupati Kabupaten Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp. OG, M.K.M, di dampingi Wakil Bupati H. Jamri ST, menyampaikan doa terbaik kepada 10 calon jamaah haji dari lingkungan Dinas pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Doa tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri kegiatan doa bersama untuk calon jamaah haji dari lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu yang dirangkaikan dengan acara upah-upah haji dan halal bihalal, yang berlangsung di Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu Jalan Wr. Supratman Rantauprapat, Kamis 16/4/2026.

"Semoga seluruh calon jamaah haji diberikan kekuatan lahir dan batin, serta menjadi haji yang mabrur dan mabrurroh. Kami juga berharap para jamaah dapat menjaga nama baik daerah selama berada di Tanah Suci," ujar Bupati.

Labbaik Allahumma Labbaik, panggilan ini adalah anugerah yang luar biasa kepada bapak ibu calon jamaah haji Kami menitipkan doa agar perjalanan ibadah ini dilancarkan sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Sebutnya.

Kepada bapak ibu yang akan berangkat, ada tiga pesan saya, pertama, jaga kesehatan, karena cuaca di tanah suci tentu berbeda dengan Labuhanbatu, pastikan fisik tetap prima agar ibadah dapat dijalankan secara maksimal, yang kedua, fokuslah beribadah tinggalkan sejenak beban pekerjaan di kantor fokuslah mengejar ridho Allah agar menjadi haji yang mabrur, dan yang ketiga doakan kami, kami mohon doakan agar keluarga besar Dinas Pendidikan Labuhanbatu tetap solid amanah dan selalu dalam lindungannya, ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati Maya pada momen tersebut mengatakan, hari ini merupakan kebahagiaan yang berlipat ganda selain bermaaf-maafan dalam rangkaian halal bihalal kita juga melaksanakan tradisi upah-upah sebagai bentuk dukungan moral dan doa bagi



Bupati Kabupaten Labuhanbatu dr. Hj. Maya Hasmita, Sp. OG, M.K.M, saat menyalamai calon jamaah haji dari lingkungan Dinas pendidikan.

rekan-rekan kita yang akan menunaikan ibadah haji tahun 1447 H.

Momen halal bihalal ini bukan sekadar rutinitas seremonial bagi kita di dunia pendidikan, ini adalah momen untuk membersihkan hati dan segala khilaf dan gesekan yang mungkin terjadi selama kita bekerja sama satu tahun terakhir dengan

hati yang bersih, Sinergi dalam mencerdaskan anak bangsa.

Selamat hari raya Idul Fitri 1447 hijriah Minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin dan untuk calon jamaah haji selamat menunaikan ibadah haji semoga menjadi haji yang mabrur dan mabrurroh serta kembali ke tanah air dengan selamat.pungkas Bupati.

Dikeempatan tersebut Bupati Labuhanbatu juga memaparkan beberapa program unggulan satu diantaranya jaminan kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu melalui program UHC BPJS PIB dan BPJS ketenagakerjaan bagi guru guru PAUD.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati kepada para calon jamaah haji.

Pada momen tersebut Bupati Labuhanbatu, Wakil Bupati serta perwakilan pimpinan Forkopimda Labuhanbatu menyerahkan secara simbolis 860 kartu BPJS ketenagakerjaan kepada 8 orang tenaga didik PAUD.

Acara ditutup dengan ceramah agama oleh Buya Dr. Syeikh Muhammad Nur Alkholidi, S.Ag, M.Hum. dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Darmansyah Siagian.

Turut hadir, para pimpinan Forkopimda Labuhanbatu, staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Kepala BPJS ketenagakerjaan, Pejabat Eselon, Pengawas, Kepala Sekolah, para guru dan calon jamaah haji lingkungan dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu. (M.Sukma)

Bupati Asahan Buka MTQ Ke 57 Tahun 2026



Bupati Asahan Taufik ZA Siregar saat membuka MTQ Ke 57 Tahun 2026

ASAHAN, BN - Bupati Asahan Taufik ZA Siregar secara resmi membuka MTQ Ke 57 tahun 2026, pembukaan MTQ tersebut dilaksanakan di aula kantor bupati Asahan, Rabu (15/04/2026).

Bupati Asahan Taufik ZA Siregar dalam keterangannya mengatakan dasar pelaksanaan MTQ Ke 57 tahun 2026 ini adalah Surat Keputusan Bupati Asahan nomor 100.3.3.2-34.7-1.3 tahun 2026 tertanggal 10 April 2026 tentang pembentukan panitia penyelenggara, dan kegiatan ini dilaksanakan sejak hari ini Rabu 15 April 2026 hingga 20 April 2026 yang pelaksanaannya dipusatkan di kota Kisaran.

Bupati Asahan juga mengatakan peserta yang mengikuti MTQ Ke 57 ini sebanyak 853 orang putra dan putri yang berasal dari 25 kecamatan yang ada di Asahan, ujarnya.

Lebih lanjut bupati Asahan juga mengatakan cabang yang diperlombakan meliputi Tilawah Al-Qur'an, Qira'at Sab'ah, Hifzil Qur'an, Fahmil Qur'an, Syarhil Qur'an, dan Khattil Qur'an, dalam pelaksanaan MTQ Ke 57 ini dilakukan secara sederhana sebagai bentuk efisiensi anggaran, akan tetapi tidak mengurangi makna dan tujuan kegiatan, dan kesederhanaan ini bukan menjadi rintangan yang berarti, kita harus membuktikan bahwa MTQ ini lahir dari kerja tulus, ikhlas, semangat yang kuat serta panggilan hati para penggiat Al-Qur'an.

Taufik ZA Siregar juga menegaskan bahwa MTQ harus menjadi media dakwah dan syiar Islam yang efektif, serta mampu mendorong pembangunan daerah melalui pembentukan generasi Qur'ani yang berkualitas, dan diharapkan para Qori, Qariah, Hafizh dan Hafizah terus dapat meningkatkan kemampuan, sehingga tidak hanya unggul secara kuantitas, tetapi juga mampu bersaing dari segi kualitas hingga tingkat nasional.

Dan diharapkan kepada Dewan Pengawas dan Dewan Hakim agar dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MTQ, sehingga ke depan dapat melahirkan qari dan qariah terbaik yang mampu berprestasi di tingkat nasional.

Bupati Asahan juga berjanji Pemerintah Kabupaten Asahan akan memberikan penghargaan kepada peserta terbaik berupa umroh bagi juara I tingkat dewasa putra/putri dan hafizh 30 juz, serta tropi dan uang pembinaan. (TP)

AWP Ucapkan Selamat atas Penunjukan Nano Suwarno sebagai PLT Ketua PWI Subang

SUBANG, BN - Aliansi Wartawan Pantura (AWP) menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas penunjukan Nano Suwarno sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Penunjukan tersebut berdasarkan Surat Keputusan PWI Pengurus Provinsi Jawa Barat Nomor: 903/PWI-JB/IV/2026 tentang Pelaksanaan Tugas Ketua PWI Kabupaten Subang Tahun 2026.

AWP menilai, kepemimpinan Nano Suwarno diharapkan mampu membawa dampak positif bagi seluruh anggota PWI di Kabupaten Subang, sekaligus memperkuat soliditas organisasi di tengah dinamika dunia jurnalistik yang terus berkembang.

Wakil Ketua AWP, M. Tohir, menyampaikan apresiasi atas penunjukan tersebut. Menurutnya, Nano Suwarno memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni dalam memimpin organisasi kewartawanan.

"Selamat dan sukses kepada Nano Suwarno atas amanah sebagai Plt Ketua PWI Subang. Kami berharap kehadiran beliau dapat membawa angin segar, meningkatkan soliditas organisasi, serta menjadikan PWI semakin berwibawa," ujarnya.

Diketahui, Nano Suwarno sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua definitif PWI Kabupaten Subang sebelum melanjutkan kiprahnya di tingkat kepengurusan provinsi.

AWP juga berharap, di bawah kepemimpinan Nano Suwarno, PWI Subang mampu menjaga kekompatan internal serta menghindari potensi perpecahan. Sebaliknya, sinergi dan kebersamaan diharapkan dapat terus terbangun demi kemajuan insan pers di Kabupaten Subang.

Dengan pengalaman yang dimiliki, Nano Suwarno diyakini mampu menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk dalam mempersiapkan Konferensi PWI Kabupaten Subang serta menata kembali keanggotaan organisasi secara profesional. (M.tohir/Asep oles).



Nano Suwarno, Plt Ketua PWI Kabupaten Subang, Jawa Barat. (ist)

BKPSDM Kabupaten Takalar Kunjungi Kabupaten Sidrap



Rombongan BKPSDM Kabupaten Takalar ketika mengunjungi Kabupaten Sidrap. (ist)

SIDRAP, BN - Untuk memperdalam strategi inovasi pelayanan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar melakukan kunjungan benchmarking ke Kabupaten Sidrap, Kamis (16/4/2026).

Rombongan BKPSDM Takalar dipimpin oleh Sekretaris BKPSDM Kabupaten Takalar, Hj. Hijrawati, S.E., M.A.P., dan diterima secara resmi di Kantor BKPSDM Sidrap yang terletak di Kompleks SKPD, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu.

Semangat sinergi ini difokuskan pada pertukaran pengetahuan mengenai pengembangan inovasi layanan serta implementasi sistem digitalisasi dalam pelayanan kepegawaian.

Melalui kunjungan ini, kedua instansi berkesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengelola sumber daya manusia aparatur di era digital.

Di antaranya adalah

penerapan aplikasi SIM-PEGNAS untuk presensi, aplikasi Smart Signature TTE dalam proses perpanjangan kontrak PPPK, serta beberapa aplikasi layanan kepegawaian lainnya.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Takalar menyambut kunjungan mereka dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah melalui studi pembelajaran langsung di daerah yang telah menerapkan sistem serupa.

"Tujuan dari kunjungan ini untuk melakukan studi pembelajaran dan berbagi pengalaman mengenai pengembangan inovasi layanan serta penerapan sistem digitalisasi dalam pelayanan kepegawaian," ungkap Hijrawati.

Sementara itu, A. Bustanil, S.AP., M.A.P. selaku Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Sidrap menyam-

paikan ucapan selamat datang kepada seluruh jajaran rombongan dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

"Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh BKPSDM Takalar dalam menjadikan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lokus studi pembelajaran terkait inovasi dan digitalisasi pelayanan kepegawaian," ujarnya.

la selanjutnya berharap agar pertemuan ini tidak hanya berhenti pada studi pembelajaran saja, tetapi juga menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas antardaerah.

"Penting saling mendukung dalam menciptakan terobosan baru yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing kabupaten sesuai dengan semangat kemajuan bersama," tandasnya.

(*/sbr)

Pemkab Bogor Bersama BPS Gelar Ground Check Peserta PBI JK Non Aktif

BOGOR, BN - Sesuai Arahan Bupati Bogor Rudy Susmanto Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Ground Check terhadap Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Non Aktif.

Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan ketepatan sasaran data penerima bantuan serta mendukung keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat Universal Health Coverage (UHC) di bawah kepemimpinan Bupati Bogor Rudy Susmanto.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa pelaksanaan ground check ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas data sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar utama pengambilan kebijakan, termasuk dalam memastikan keberlanjutan program UHC.

"Data menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Karena

itu, kolaborasi dengan BPS dan seluruh perangkat daerah sangat penting agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam mendukung keberhasilan program UHC di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Sekda juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tantangan besar dalam pengelolaan data sosial, termasuk dinamika tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Kondisi tersebut, menurutnya, harus disikapi dengan kerja kolaboratif lintas sektor.

"Ini bukan hanya tugas satu instansi, tetapi kerja bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan haknya, terutama dalam kepesertaan PBI JK yang menjadi bagian penting dari UHC," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bogor Bambang Pamungkas menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan kualitas data melalui verifikasi lapangan dan pembaruan data berbasis kondisi riil masyarakat.

BPS juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, DPMD,



Sekda Kab Bogor, Ajat Rochmat Jatnika (Kiri pakai kemeja hitam). (Em1)

hingga unsur pendamping sosial di lapangan.

"Data bukan hanya angka, tetapi dasar kebijakan. Jika data tidak akurat, maka kebijakan juga akan meleset. Karena itu ground check ini menjadi sangat penting, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program UHC di Kabupaten Bogor," ungkapnya.

Dalam forum tersebut juga dibahas tantangan pelaksanaan ground check PBI JK Non Aktif yang saat ini masih berjalan di lapangan, termasuk perlunya percepatan, pemerataan capaian, serta peningkatan kualitas verifikasi agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam penetapan kepesertaan.

Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan proses ground check ini dapat diselesaikan secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bogor. (em1)

Ketua Jadi Tersangka Korupsi, Ombudsman RI Minta Maaf



Ketua Ombudsman RI Hery Susanto, saat digelandang petugas Kejaksaan. (Ant)

JAKARTA, BN - Ombudsman RI meminta maaf terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di wilayah Sulawesi Utara periode 2013-2025 yang menyeret ketuanya yakni Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas," dikutip dari laman resmi Ombudsman, Kamis (16/4).

Pimpinan Ombudsman periode 2026-2031 mengatakan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada Kejaksaan Agung serta akan bertindak kooperatif.

Ombudsman menegaskan akan menjaga komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, pimpinan Ombudsman memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," tulisnya.

Pimpinan Ombudsman periode 2026-2031 terdiri dari Wakil Ketua merangkap anggota, Rahmadi Indra Tektona serta tujuh anggota lainnya yakni Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.

Hery diproses hukum Kejaksaan Agung atas dugaan menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI. Pemberian tersebut berkaitan dengan surat rekomendasi khusus untuk membatalkan kebijakan Kementerian Kehutanan terkait dengan perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Atas perbuatannya, Hery dijera dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP. Dia juga langsung ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan.

(sumber cnn Indonesia/red)

Bupati Belitim Kukuhkan PTI Satpol PP, Perkuat Pengawasan Internal



Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten didampingi Kasat Pol PP Belitim, Novis Ezuar berfoto bersama jajaran Satpol PP dan personel Petugas Tindak Internal (PTI) yang baru dikukuhkan di halaman Kantor Satpol PP Belitim.

BELITUNG, BN - Suasana khidmat mewarnai halaman Kantor Satpol PP Kabupaten Belitung Timur, Kamis (16/4/2026), saat puluhan personel berseragam praja berkumpul dalam upacara pengukuhan Petugas Tindak Internal (PTI).

Di bawah terik matahari pagi, barisan anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) membentuk formasi setengah lingkaran mengelilingi tiang bendera Merah Putih. Momen tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan internal korps penegak Peraturan Daerah di Belitung Timur.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, secara resmi mengukuhkan PTI sebagai unit baru yang berfungsi mengawasi kedisiplinan dan kode etik anggota Satpol PP. Pengukuhan dilakukan secara simbolis kepada dua perwakilan anggota, menandai dimulainya peran PTI dalam menjaga integritas institusi.

Kasat Pol PP Belitung Timur, Novis Ezuar menjelaskan pembentukan PTI ini merupakan jawaban langsung atas instruksi Bupati saat dirinya dilantik. Bupati menginginkan adanya pembenahan internal agar citra Satpol PP di mata masyarakat semakin berintegritas.

"PTI ini semacam Propam-nyalah kalau di Kepolisian. Ada 16 orang anggota yang kami pilih secara selektif. Merekalah nanti yang mengawasi terkait kedisiplinan dan kode etik daripada anggota Satpol PP saat bertugas," ujar Novis.

Ada 16 personel PTI yang akan menjadi pengawas bagi pimpinan di lapangan. Novis sendiri tidak menampik bahwa tugas Satpol PP rentan terhadap gesekan ataupun potensi pelanggaran.

Jika ditemukan pelanggaran disiplin di lapangan, PTI berwenang untuk menindak anggota tersebut. Novis mengatakan mekanisme persidangan internal pun telah disiapkan untuk menentukan sanksi bagi mereka yang melenceng. "Nanti ada semacam sidang PTI. Dari hasil sidang itulah akan diputuskan apakah anggota tersebut diberikan peringatan atau hukuman disiplin," ucapnya.

Satpol PP Belitim juga telah melakukan perencanaan strategis sepanjang tahun 2026. Prioritas mereka tetap pada penegakan Peraturan Daerah (Perda), terutama mengenai isu-isu lingkungan dan aset daerah.

Novis mengungkapkan penambahan ilegal masih menjadi tantangan terberat yang dikeluarkan masyarakat. "Fokus utama kami adalah melindungi aset-aset daerah yang terancam oleh kegiatan ilegal. Kami memprioritaskan area yang jika dibiarkan akan merusak infrastruktur umum atau fasilitas vital milik pemerintah," ungkapnya. (AS/*)

Musrenbang RKPD ...

Dalam suasana yang sarat dialog dan pemikiran strategis, Musrenbang RKPD 2027 menjadi ruang penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Tidak sekadar forum formal, kegiatan ini menghadirkan semangat kebersamaan dalam merancang pembangunan yang inklusif, adaptif, serta mampu menjawab tantangan zaman.

Kolaborasi menjadi kata kunci yang terus digaungkan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang tidak hanya merata, tetapi juga berkelanjutan. Disisi lain, inovasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan, menghadirkan solusi kreatif atas berbagai persoalan perkotaan. Tak kalah penting, pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan. Dengan data yang kuat, setiap program pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui forum ini, optimisme akan masa depan Kota Bandung semakin menguat. Sebuah harapan bersama untuk menghadirkan kota yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga tumbuh sebagai ruang hidup yang nyaman, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dengan semangat kolaborasi yang terus dijaga, Bandung melangkah mantap menuju masa depan menjadi kota yang mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri lokalnya.

Pada kesempatan itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut Musrenbang RKPD 2027 bukan hanya seremonial, tetapi momentum penting untuk menyepakati arah pembangunan Kota Bandung rencana kerja tahun depan.

Bahkan, Pemkot Bandung menjadikan penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagai pekerjaan rumah utama dalam arah pembangunan ke depan. Farhan menyebutkan, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung saat ini berada di angka 7,44 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat. Kondisi tersebut menjadi fokus utama karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Ini pekerjaan rumah yang sangat berat. Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Bandung bisa mencapai 7 hingga 8 persen dalam tiga tahun ke depan," ujar Farhan.

Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Bandung akan mendorong sejumlah sektor ekonomi unggulan, salah satunya industri fashion. Menurut Farhan, Bandung memiliki potensi besar sebagai kota kreatif yang identik dengan tren fashion. Karenanya Farhan mendorong agar Kota Bandung kembali ke jati dirinya sebagai kota fashion pasalnya sector tersebut dapat menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, Pemkot Bandung juga menaruh perhatian serius pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan. Farhan mengakui kondisi kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini mengalami penurunan. Oleh sebab itu, ia memastikan, perbaikan jalan akan segera dilakukan mulai bulan ini dengan anggaran sekitar Rp300 miliar. Tahap awal akan difokuskan pada 17 ruas jalan, serta dilakukan secara kolaboratif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Dalam satu hingga dua bulan ke depan, kita bergerak bersama provinsi untuk percepatan perbaikan dan beautifikasi jalan," jelasnya.

Di sisi lain, Farhan menyebut, program padat karya hanya bersifat sementara. Untuk solusi jangka panjang, Pemkot Bandung akan mendorong pertumbuhan dunia usaha guna menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Ditegaskannya, kunci utamanya investasi. Dari investasi Farhan menilai akan muncul lapangan usaha, selanjutnya harus dilakukan matching antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja.

Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya jumlah pendatang usia produktif ke Kota Bandung. Berdasarkan data Laci RW yang telah direkomendasikan Badan Pusat Statistik, terdapat sekitar 150.000 pendatang usia produktif di Kota Bandung. Menurutnya, kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai peluang dengan memastikan para pendatang mendapatkan akses administrasi kependudukan.

"Kalau mereka punya KTP Bandung, peluang mendapatkan

pekerjaan dan pelatihan dari pemerintah akan lebih terbuka. Jadi kami dorong segera mengurus administrasi kepindahan," katanya.

Inovasi Laci RW: Pendekatan Bottom-Up yang Presisi

Wali Kota Bandung tak luput menekankan bahwa perencanaan tahun 2027 akan semakin fokus pada penguatan peran masyarakat melalui aplikasi Laci RW (Layanan Catatan Informasi RW). Inovasi ini merupakan implementasi nyata dari pendekatan Bottom-Up (bawah-atas) – satu dari lima pendekatan utama dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) – yang dikolaborasi dengan pendekatan teknokratik.

"Laci RW bukan sekadar aplikasi, melainkan bank data warga yang menjadi rujukan nyata dalam pengambilan keputusan. Kita beralih dari perencanaan berdasarkan asumsi menuju perencanaan berbasis data riil dari lapangan," tegas Wali Kota.

Kebijakan ini juga selaras dengan prinsip THISS/HITSS (The-matic, Holistic, Integrative, Spatial, and Sustainable), di mana data dari tingkat RW memungkinkan intervensi pemerintah menjadi lebih tematik dan spesifik secara spasial, mulai dari isu stunting, pengelolaan sampah mandiri, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.

Sinergi Bappeda Provinsi dan Capaian Kinerja Kota

Dalam kesempatan tersebut, pihak Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam paparannya memberikan apresiasi terhadap capaian makro Kota Bandung. Dengan IPM mencapai 84,66 dan PDRB per kapita Rp158,50 juta, Kota Bandung tetap menjadi lokomotif ekonomi di Jawa Barat. Namun, Bappeda Provinsi juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi kebijakan untuk menekan angka pengangguran (IPT 7,40%) dan ketimpangan (Gini Ratio 0,420).

Sinkronisasi ini diwujudkan melalui pengintegrasian program strategis provinsi dengan kebutuhan warga yang terekam di Laci RW, seperti penurunan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo, melaporkan bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan penting dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027. ŷila menyebutkan, sebanyak 3.452 usulan masyarakat telah masuk ke dalam sistem, dengan 3.269 usulan disetujui dan 152 usulan dikembalikan untuk perbaikan. Total pagu indikatif yang dialokasikan mencapai Rp154 miliar.

"Seluruh usulan masih dalam proses verifikasi akhir dan akan menjadi bagian dari berita acara kesepakatan Musrenbang tingkat kota," tandasnya.

Adapun Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Yayat Ahadiat Awaludin, S.Si., M.H. yang turut hadir bersama jajarannya, menyatakan kehadirannya sebagai bentuk dukungan aktif dalam perencanaan pembangunan daerah. Melalui kolaborasi yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta dukungan data yang akurat, diharapkan arah pembangunan Kota Bandung semakin tepat sasaran dan mampu menjawab tantangan masa depan.

Sedangkan Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Hendri, S.Si., M.M. menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan statistik tersebut dinyatakan LAYAK untuk dilaksanakan, dengan sejumlah catatan rekomendasi yang diberikan yaitu penekanan terhadap pentingnya penerapan standar internasional Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), penyusunan metadata statistik, serta kewajiban penyampaian hasil kegiatan statistik kepada BPS untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas data yang dihasilkan. Maka dari itu, bahwa data statistik dapat menjadi acuan bagi perencanaan Pembangunan dan pertumbuhan Kota.

Poin Utama Kebijakan RKPD 2027 Kota Bandung:

Pendekatan Partisipatif & Bottom-Up, dengan memperkuat musyawarah dari level RW menggunakan data Laci RW untuk memastikan aspirasi warga terserap secara akurat. Sementara Efisiensi Fiskal, dengan mengarahkan Belanja Modal pada sektor produktif dan infrastruktur kewilayahan guna mengurangi disparitas ekonomi. Begitu pula Digitalisasi Perencanaan, dengan menginte-

Sambungan hal 12

grasikan data statistik sektoral BPS dengan sistem informasi pembangunan daerah untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan instansi vertikal seperti BPS, RKPD Kota Bandung Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi solusi nyata bagi permasalahan warga Kota Bandung.

Acara Musrenbang RKPD Tahun 2027 pun menjadi momentum krusial dengan diterimanya Rekomendasi Statistik Sektoral dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung yang diserahkan langsung kepada Wali Kota Bandung.

Rekomendasi Statistik BPS Kota Bandung

Kepala BPS Kota Bandung, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan statistik tersebut dinyatakan LAYAK untuk dilaksanakan, dengan sejumlah catatan rekomendasi yang diberikan yaitu penekanan terhadap pentingnya penerapan standar internasional Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), penyusunan metadata statistik, serta kewajiban penyampaian hasil kegiatan statistik kepada BPS untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas data yang dihasilkan. Maka dari itu, bahwa data statistik dapat menjadi acuan bagi perencanaan Pembangunan dan pertumbuhan Kota.

Poin Utama Kebijakan RKPD 2027 Kota Bandung:

1. Pendekatan Partisipatif & Bottom-Up, dengan memperkuat musyawarah dari level RW menggunakan data Laci RW untuk memastikan aspirasi warga terserap secara akurat.

2. Efisiensi Fiskal, dengan mengarahkan Belanja Modal pada sektor produktif dan infrastruktur kewilayahan guna mengurangi disparitas ekonomi.

3. Digitalisasi Perencanaan, dengan mengintegrasikan data statistik sektoral BPS dengan sistem informasi pembangunan daerah untuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan instansi vertikal seperti BPS, RKPD Kota Bandung Tahun 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi solusi nyata bagi permasalahan warga Bandung.

Kebijakan Publik yang Adaptif

DPRD Kota Bandung berharap Musrenbang RKPD 2027 dapat terus menunjukkan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Dengan begitu, hasil realisasi program dapat bergerak simultan dan mencapai target pembangunan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, Edwin Senjaya menyatakan, perencanaan menjadi penting dalam pembangunan yang tepat sasaran melalui Musrenbang. Karena itu, pihaknya berharap Musrenbang yang sudah diadakan dari tahun ke tahun ini punya peningkatan. Peningkatan secara mutu, kualitas yang dihasilkan, sehingga pembangunan memiliki progress ke depan. Edwin juga menegaskan Musrenbang bukan hanya terasa sebagai ajang selebrasi, tetapi betul-betul menghasilkan kesepakatan bersama-sama untuk membangun Kota Bandung mulai dari pemerintahan terendah tingkat kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat kota dan berakhir di tingkat nasional.

Ia menyebut kota sebagai entitas hidup yang terus berkembang dan membutuhkan kebijakan publik yang adaptif. Bahkan secara tegas Edwin menyampaikan komitmen DPRD Kota Bandung untuk mendukung sekaligus mengawal program pembangunan bersama Pemkot Bandung, baik melalui Musrenbang, program prakarsa kewilayahan, maupun hasil reses anggota dewan.

"Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kami siap menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis agar pembangunan Kota Bandung berjalan optimal," katanya.

Edwin memandang perencanaan menjadi penting dalam pembangunan yang tepat sasaran melalui Musrenbang. Ia menyebut kota sebagai entitas hidup yang terus berkembang dan membutuhkan kebijakan publik yang adaptif. (Adv)

Dexlite di Beltim Naik Menjadi Rp 24.150 Per Liter, Masyarakat Resah

BELTIM, BN - Suasana jalur pengisian BBM Dexlite di SPBU Desa Padang, Manggar, Belitung Timur, tampak lenggang setelah berlakunya harga baru, kontras dengan antrian Pertalite di sebelahnya, Sabtu (18/4/2026). Kenaikan harga Dexlite yang menyentuh angka

Rp24.150 per liter membuat volume penjualan di SPBU tersebut menurun drastis, hingga menyebabkan stok cadangan sebanyak 17 ton di tangki belum terserap oleh konsumen. Harga BBM non-subsidi jenis Dexlite di Kabupaten Belitung Timur me-

lonjak menjadi Rp24.150 per liter. Kenaikan tajam harga Dexlite ini menyusul pengumuman penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh Pertamina per 18 April 2026.

Pantauan wartawan di SPBU Desa Padang, Kec Manggar pada Sabtu (18/4/2026) siang, jalur

pengisian Dexlite tampak lenggang. Tidak ada satu pun kendaraan mengisi BBM Dexlite. Kepala Pengelola SPBU Desa Padang, Jumhari mengatakan kenaikan harga kali ini tergolong sangat ekstrem. Harga Dexlite yang semula berada di angka Rp14.500 per liter, kini

meroket tajam menjadi Rp24.150 per liter. "Mulai hari ini yang naik itu Dexlite, dari Rp14.500 menjadi Rp 24.150. Pengumuman tadi malam jam 00.00 WIB," ujar Jumhari. (as)



SPBU di Desa Padang, Manggar, Belitung Timur, yang menjual Dexlite tampak sepi. (ist)

KPK : 81% ...

mengalirkan uang itu bukan hanya ke keluarga tapi juga selingkuhan.

Hal tersebut disampaikan Ibnu saat acara Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi dilihat di kanal YouTube Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Minggu (19/4/2026). Sosialisasi ini digelar di PN Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Mulanya, Ibnu mengatakan hasil korupsi berkaitan erat dengan TPPU. Pihaknya sering menemukan kasus tersebut di mana pengusutannya bisa dilakukan berbarengan.

"Kalau ada korupsi muncul biasanya akan muncul TPPU, biasanya begitu, bisa bersama-sama bisa sesudahnya, kalau bersama-sama itu kompliit sudah buktinya kalau sendiri-sendiri bukti terhadap TPPU atau menyelesaikan tindak pidana pokoknya dulu setelah itu TPPU muncul," kata Ibnu.

Ibnu mengungkap TPPU dilakukan para koruptor untuk menyamarkan hasil korupsi. Uang haram itu, katanya, diberikan koruptor ke keluarga, sumbangan amal sana sini hingga piknik.

"Begitu melakukan korupsi, si koruptor sudah memberikan ke semuanya, istri sudah, anak sudah, keluarga sudah, untuk amal ibadah sudah, sumbangan sana-sini sudah, piknik sudah, untuk tabungan sudah, bingung

Sambungan hal 1

ke manakah uang Rp 1 miliar ini," ujarnya. "Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa, kalau ditaruh tabungan-tabungan lagi takut PPAK," tambahnya.

Di sinilah, Ibnu mengatakan koruptor juga menyamarkan uang hasil korupsinya dengan memberikan ke selingkuhannya. Rata-rata, kata Ibnu, 81% koruptor laki-laki melakukan ini.

"Kemudian ke mana dia biasanya, pelakunya banyaknya laki-laki Pak, 81% laki-laki, ke mana, ah ngelihat ini yang cantik-cantik di sana, mulai cari yang bening-bening ini, didekati 'adindaku kuliah di mana adinda' 'hai mas' si cewek, padahal sudah tua dibilang mas, 'kok kamu bilang mas' 'bapak masih muda'. Itu cerita di sana tapi betul itu adanya, ratusan juta dikucurkan ke cewek itu," tuturnya.

Ibnu mengungkap penerima TPPU itu bisa disebut sebagai pelaku pasif. Di mana, pelaku pasif menerima dan menabung uang hasil korupsi. "Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan sebagai pelaku pasif menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana," tuturnya. "Jadi kita harus menduga bahwa uang itu berasal dari kejahatan setidak-tidaknya uang itu diduga berasal dari kejahatan," tambahnya. (sumber detik.com/red)

Peras Bawah ...

Sepatu LV

Budi menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Tulungagung yang memberikan dukungan atas proses penyidikan yang tengah berjalan di KPK. "Kami akan terus update per-

kembangan dan hasil penggeledahannya," jelasnya.

Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung pada Jumat (11/4/2026). KPK menetapkan Bupati Gatut Sunu Wi-

bowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

KPK menyebut modus yang digunakan Bupati dengan menekan 16 OPD untuk menyeter uang Rp

5 miliar. Dari permintaan itu telah terealisasi Rp 2,7 miliar. Uang hasil korupsi digunakan Bupati untuk membeli sepatu mewah, berobat, jamuan makan dan pemberian THR forkopimda. (sumber detik.com/red)

Sambungan hal 1

Dalami Korupsi ...

Selempang, serta AH merupakan pihak swasta.

Sementara, pada Kamis (16/4/2026), penyidik KPK kembali memanggil empat saksi tambahan yakni MK, AS, SR, dan AM. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua dari

empat saksi yang diperiksa merupakan kepala desa yakni MK kepala desa di Kecamatan Klampis, dan AS kepala desa di Kecamatan Tanjung Bumi.

Adapun dua orang saksi lainnya adalah SR yang diketahui berstatus

ibu rumah tangga serta AM yang berprofesi sebagai wiraswasta. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah saksi terlihat mendatangi Mapolres Bangkalan.

Pada berbagai kesempatan secara tegas KPK

memastikan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Publik menanti penuntasan mega korupsi Hibah APBD Jatim oleh KPK. (toddy/red)

Sambungan hal 1

Bongkar Dugaan ...

melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Nasaka Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nilai hibah seluruhnya sebesar Rp.580.000.000,00

3. Sebanyak 1.331 Pokmas tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan hibah sesuai *dokumen hukum* sampai melewati batas waktu yang ditetapkan. Nilai hibah seluruhnya sebesar Rp.237.823.975.500,00

Lemahnya sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan hibah oleh Dinas PU Bina Marga Jatim terjadi secara berulang. Sebelumnya, BPK dalam laporan hasil pemeriksaannya juga mengungkap temuan yang sama yakni pekerjaan fiktif, pengurangan volume, hingga LPJ bermasalah.

Pelanggaran sistemik atas penyelenggaraan hibah "asal-asalan," Dinas PU Bina Marga Jatim tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 60.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 BAB I Huruf B Belanja Daerah Nomor 7. Dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Kelebihan perhitungan dari kekurangan volume pekerjaan atas realisasi hlbah pada 10 Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebesar Rp.245.786.338.00;

2. Sebanyak 5 Pokmas tidak melaksanakan pekerjaan sesuai *dokumen hukum* sampai melewati batas waktu yang ditetapkan dalam Nasaka Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan nilai hibah seluruhnya sebesar Rp.549.469.000,00

3. Sebanyak 2.066 Pokmas tidak menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan hibah

115 ASN ...

BKPSDM Drs. Anwar MKP. Hadir Ketua Tim Status dan Pemberhentian Kanreg II BKN Surabaya Thomas Agustianto, perwakilan Bank Jatim Cabang Jombang, Bank Mandiri Taspen Jombang, serta 115 calon purna tugas.

Saat itu Kepala BKPSDM Drs. Anwar MKP melaporkan, total 115 ASN menerima SK pensiun dengan rincian: 30 orang TMT April, 41 orang TMT Mei, dan 44 orang TMT Juni 2026. "Kegiatan ini bentuk apresiasi Bapak Bupati atas kinerja PNS dalam mengabdikan hingga purna bhakti," ujar Anwar.

Sedangkan saat itu Bupati Warsubi menegaskan, regenerasi birokrasi wajar demi keberlanjutan kinerja pemerintah. Ia mengapresiasi puluhan tahun pengabdian para ASN. "Purna bhakti bukan akhir kontribusi Bapak/Ibu memberi saran, ide, gagasan, maupun inovasi untuk Jombang. Pensiun juga bukan berarti berhenti dari aktivitas sosial kemasyarakatan," jelasnya.

"Setiap ada awal, tentu ada akhir. Ada saat kita bekerja bersama, dan ada waktunya untuk berpisah. Bukan dalam kehidupan, melainkan dari ritme birokrasi," ujarnya.

"Pesan saya agar Bapak/Ibu tetap sehat, bahagia, produktif, dan jaga silaturahmi. Selamat, tunai sudah janji

Sambungan hal 1

bhakti sebagai abdi negara. Selamat menikmati masa pensiun dengan syukur. Semoga sehat, bahagia, serta berkah di setiap langkah," tandasnya.

Sementara itu di sampaikan oleh Ketua Tim Status dan Pemberhentian Kanreg II BKN Surabaya, Thomas Agustianto, mengingatkan waspada penipuan mengatasnamakan Taspen. "Jangan percaya kalau dimintai data atau nomor rekening atau WhatsApp. Jika ragu, datang ke kantor cabang untuk konfirmasi," ujarnya.

Selanjutnya dari Branch Manager PT Taspen Cabang Surabaya, Fuji Widya Rachmadi, memperkenalkan aplikasi "Andal" untuk autentikasi atau absen mandiri pensiunan.

Pada acara tersebut telah dilakukan penyerahan SK simbolis oleh Bupati Warsubi kepada dua perwakilan: Drs. Yustinus Harris Eko Prasetyo, dan Agus Supriyanto, SH, M.Si Sekam Baring, dilanjutkan foto bersama.

Secara keseluruhan momen ini menegaskan bahwa purna tugas hanyalah akhir pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara tetap berlanjut dalam bentuk lain. (Tok/Adv)

BPJS Ketenagakerjaan ...

Sambungan hal 1

gakerjaan Pekalongan, Selasa (14/4/2026).

BPJS Ketenagakerjaan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan institusi maupun pihak terkait. Seluruh rangkaian proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya apapun.

"Semua proses rekrutmen dilakukan secara profesional dan bebas dari intervensi pihak manapun. Kami nantikan kontribusi Anda sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja Indonesia," tutup Widhi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekalongan. (Dikin)

Terlibat Korupsi ...

Sambungan hal 1

"Dalam proses penerbitan perizinan ini, jika pemohon tidak memberikan uang, izin bisa tidak kunjung diterbitkan. Adapun besaran uang yang diminta bervariasi, untuk percepatan izin pertambangan berkisar Rp 50 juta hingga Rp100 juta, sedangkan untuk perpanjangan Rp200 juta, sedangkan untuk izin perusahaan air tanah (SIPA) berkisar Rp 5 juta hingga Rp20 juta. Total uang yang diduga terkumpul dari hasil pungutan itu mencapai Rp 2,36 miliar," ungkap Wagiyu.

Lebih lanjut ditegaskan, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini dan apakah ada upaya menyamarkan asal-usul dana tersebut. "Kejati Jatim mengimbau masyarakat yang merasa dipersulit dalam proses perizinan untuk melapor,"

Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan guna mencegah kemungkinan menghilangkan barang bukti maupun mengulangi perbuatan. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan penerapan dalam KUHP. Penyidik juga masih mendalami kemungkinan penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (toddy/red)

Silaturahmi ...

Sambungan hal 6

dukungan terhadap pendidikan keagamaan di tingkat dasar. Kebijakan tersebut disosialisasikan dalam kegiatan silaturahmi bersama Guru TPQ Penerima Insentif se Kabupaten Jombang, yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Rabu (15/ April/ 2026)

Pada acara silaturahmi tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Purwanto, yang hadir mewakili Bupati Jombang, menyampaikan bahwa peran guru TPQ sangat strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Ia menegaskan bahwa kontribusi para pengajar tidak dapat diukur hanya dari sisi materi. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru TPQ. Peran panjenengan semua sangat penting dalam menanamkan nilai agama serta membantu memberantas buta aksara Al-Qur'an sejak dini," tuturnya.

Selain itu Purwanto menambahkan, pemberian insentif ini diharapkan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah, meskipun belum sepenuhnya sebanding dengan dedikasi yang telah diberikan para guru. "Kami memahami bahwa bantuan ini belum sebanding dengan waktu, tenaga, dan keikhlasan yang diberikan. Namun kami berharap, insentif ini bisa menjadi penyemangat sekaligus wujud kepedulian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan," ujarnya.

Sedangkan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang, Supriadi menambahkan, "Bahwa program ini menasar ribuan guru dan lembaga TPQ di seluruh wilayah Jombang," tambahnya.

Selain itu perlu diketahui, bahwa tahun ini terdapat 6.500 guru ngaji dan 1.816 lembaga TPQ yang menjadi sasaran penerima. Masing-masing guru menerima insentif tahunan sebesar Rp 1.000.000, yang dicairkan dalam dua tahap, di mana jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 750.000," ungkapnya.

Ditambahkan lagi oleh Supriadi, "Bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memastikan tertib administrasi serta memperkuat basis data pengajar keagamaan. "Program ini tidak hanya soal bantuan, tetapi juga bagian dari upaya penataan data dan penguatan program kesejahteraan guru ke depan," katanya lagi.

Pada kesempatan di acara tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan santunan jaminan kematian kepada tiga ahli waris guru TPQ, masing-masing sebesar Rp42.000.000. Salah satu guru TPQ Al-Furqon Mojokulon, mengaku bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah daerah. "Kami sangat berterima kasih atas insentif ini. Nominalnya mungkin tidak besar, tetapi bagi kami ini sangat berarti sebagai bentuk perhatian dan dukungan agar kami tetap semangat mengajar," ujarnya.

Secara ringkas silaturahmi ini adalah perpaduan antara penghargaan atas pengabdian (apresiasi) dan kewajiban administratif (sosialisasi) yang di balut dalam suasana kekeluargaan. (Tok/Adv)

Pemkan Pinrang ...

Sambungan hal 8

Kepala Puskesmas Sali-sali kini diemban oleh dr. Nurut Fitrianti Sah.

Dalam penyampaiannya, Wabup Sudirman menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang memiliki tingkat ekspektasi tinggi dari masyarakat, sehingga peningkatan kualitas layanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

Olehnya itu, lanjutnya, pergantian pimpinan ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam pengelolaan layanan kesehatan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

"Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, kita berharap setiap pimpinan mampu menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Wabup Sudirman.

Dirinya juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam menata organisasi, membangun kerja sama tim yang solid, serta mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kehadiran Puskesmas tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga menjadi pusat pelayanan kesehatan yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. (*syabir/Han)

Didukung IKMA ...

Sambungan hal 12

"Ini penting karena dengan momentum seperti dimanfaatkan sebagai sarana promosi, dimaksudkan agar nama Magetan dengan segala potensinya lebih dikenal di beberapa daerah maupun mancanegara, sehingga dengan hal tersebut kunjungan wisata maupun jumlah investasi yang masuk ke Magetan dapat terus meningkat," tambah Bunda Nanik.

Dikesempatan ini Bupati juga berharap peran IKMA untuk membantu mempromosikan potensi Magetan ke khalayak yang lebih luas.

Menunjukkan potensi seni dan ekonomi kreatif di Magetan kemudian ditampilkan lagu-lagu daerah dari Savana D'Academy 7 yang dipadukan dengan peragaan busana batik khas Magetan.

Tak mau ketinggalan tampil pula penyanyi Udin Genxut Didi Kempot reborn, menyanyikan lagu Kalung Emas dan dari The God Father of Broken Heart

Puncak acara dimeriahkan dengan penampilan Drama Tari kolaborasi sandosa bertajuk "Gembring Baring Kawedar Ing Bumi Mageti". Karya seni ini terinspirasi dari sosok heroik Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Wedana Mancanegara Wetan yang dikenal memiliki sikap anti-kolonialisme demi menjaga harga diri bangsa. Pertunjukan ini akan menampilkan perjalanan sejarah sang bupati, termasuk pesan perlawanan yang melegenda: "Bahwa dia tidak mau menyakiti orang Jawa dan hanya ingin membunuh semua orang yang menjadi beban bagi masyarakat Jawa dan Tionghoa di wilayah Timur". (Adv/Ashar)

Tingkatkan Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Daerah Lebih Baik, DPRD Kabupaten Pasuruan Serahkan Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2025



PASURUAN, BN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan melaksanakan Rapat Paripurna II Penyampaian Rekomendasi Komisi-Komisi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025. Rabu 8 April 2026.

REKOMENDASI merupakan catatan-catatan strategis berisikan perbaikan, penyempurnaan dan evaluasi atas kebijakan serta kinerja anggaran pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk implementasi dari fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan mencermati beberapa hal berkaitan dengan materi LKPJ Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana disampaikan oleh masing-masing komisi.

Rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset

dan Inovasi Daerah (Bapperida) harus mampu melakukan inovasi dalam segala hal untuk mensejahterakan masyarakat mengingat banyaknya potensi yang butuh dukungan pendampingan pemerintah;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Optimalisasi aset daerah mengingat masih banyaknya aset pemerintah daerah terbengkalai. Dengan optimalisasi aset melalui inventarisasi dan evaluasi aset untuk kemudian dilakukan kajian pemanfaatan;

- Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dikembalikan pada fungsi awal sebagai Pusat Pelatihan Atlet Olah Raga Kabupaten Pasuruan, dengan tidak mengurangi peran dan fungsi KPU dengan memfasilitasi gedung yang layak dan representatif.

3. Sekretaris Daerah Bagian Hukum perlu melakukan review kajian kembali terkait produk hukum yang ada disesuaikan dengan regulasi yang terbaru, pembentukan peraturan daerah terkait dengan penanganan dan pencegahan banjir sejak dini ;

4. Inspektorat Daerah perlu melakukan peningkatan pengawasan dan kerja sama multi pihak antara pemangku kepentingan untuk menciptakan menajemen yang efektif, efisien serta tepat guna. Perlunya peningkatan

pendampingan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di masing-masing perangkat daerah, ADD maupun DD;

5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Pembinaan dan pengawasan lebih intensif terhadap ASN, PNS maupun P3K terkait kinerja kompetensi dan kedisiplinan terutama edukasi terutama bijak bermedia sosial;

6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) penegakan peraturan daerah lebih responsif, cepat dan tepat, menambah SDM (personil) pemadam kebakaran yang cukup dan profesional, optimalisasi mobil damkar dengan pengadaan baru mengingat wilayah geografis pasuruan sangatlah luas diharapkan memiliki pos di beberapa titik;

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam perencanaan dan pelaksanaan program hendaknya menerapkan pilot projek satu kecamatan memiliki satu desa percontohan baik pelayanan administrasi, ketahanan pangan, BumDes, UMKM, dan Pariwisata Desa dipicu sesuai potensi desa dengan memperhatikan kearifan lokal;

8. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) diharap mampu mempercepat program digitalisasi hingga ke desa melalui

program desa digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa;

9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) secara keseluruhan pelayanan administrasi kependudukan cukup baik, namun demikian sarana prasarana dan fasilitas perkantoran tidak layak. Kondisi tersebut hendaknya menjadi perhatian serius;

Adapun Rekomendasi Komisi II, Rekomendasi Komisi III dan Rekomendasi Komisi IV secara tertulis diserahkan kepada Wakil Bupati Pasuruan Shobih Asrori dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat oleh juru bicara dari masing-masing komisi di DPRD.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat dalam pidatonya secara khusus meminta atensi kepada Bupati atas jajaran atas seluruh materi rekomendasi komisi baik itu berupa saran, harapan, maupun kritik yang konstruktif agar diperhatikan sungguh-sungguh.

"Catatan-catatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih baik dimasa yang akan datang," tegas politisi senior PKB.

(*Adv)



Penyerahan Rekomendasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pasuruan Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025



Foto Bersama : Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori (kiri) - Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat



Pemandangan Berita Acara tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Pasuruan oleh Wakil Bupati Shobih Asrori

MUSRENBANG RKPd 2027 ; Bersama Wujudkan Kota Bandung Lebih Maju, Adaptif dan Berdaya Saing



PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai penanda bahwa komitmen Pemkot Bandung untuk fokus pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Musrenbang sendiri merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui badan perencanaan (Bappeda) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar

urusan dan alokasi anggaran.

Musrenbang merupakan pendekatan bottom-up di mana suara warga bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Kendati pada mulanya, Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Acara Musrenbang RKPd Kota Bandung Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grandia, Kamis (9/4/2026), dihadiri oleh para pemangku kepentingan lintas sektor. Sekitar 360 undangan sebagai peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kota Bandung dari berbagai fraksi, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga insan pers. Agenda utama kegiatan adalah membahas

rancangan RKPd Kota Bandung Tahun 2027 sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah.

Dalam laporan penyelenggaraan disampaikan bahwa Musrenbang RKPd Kota Bandung 2027 merupakan bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses perencanaan telah melalui berbagai tahapan mulai dari Musrenbang tingkat RW, kelurahan, kecamatan, hingga forum perangkat daerah yang berlangsung sejak Januari hingga April 2026.

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri, tercatat sebanyak 3.452 usulan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 3.269 usulan disetujui, sementara 152 usulan ditolak atau dikembalikan untuk perbaikan. Seluruh usulan saat ini masih dalam proses verifikasi akhir dan telah dialokasikan pagu indikatif sebesar Rp154 miliar.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan kick-off program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) sebagai bagian dari upaya penguatan data sektoral di tingkat kewilayahan.



Moment Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Pemkot Bandung.

Melalui Musrenbang RKPd Tahun 2027 yang mengusung tema "Menuju Bandung Masa Depan: Kolaborasi, Inovasi, dan Data sebagai Fondasi Pembangunan" ini, Pemkot Bandung berharap dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan tepat sasaran. Begitu juga forum ini menjadi ruang strategis dalam menyatukan aspirasi serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

■ Bersambung ke hal. 10 kol. 1

Didukung IKMA, Magetan Bawa Pesona di Panggung Budaya TMII 2026



MAGETAN, BN - Badan Penghubung Daerah Propinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Magetan gelar perhelatan "Gelar Seni Budaya Daerah (GSBD) " dan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Magetan di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Sabtu malam (17/4/26). Agenda strategis ini dirancang sebagai sarana promosi berkelanjutan untuk memperkenalkan kekayaan seni, budaya, serta potensi UMKM, dan ekonomi kreatif Magetan kepada khalayak luas.

Diawali dengan tampilan tari sambutan "Puspita Lawu" sebagai sebuah tarian yang menggambarkan filosofi kehidupan dan keteguhan hayati melalui bahasa tubuh. Dengan kostum merak para penari, menari dengan luwesnya.

Di kesempatan ini, Ketua IKMA, Purn. Laksamana Muda

TNI Yoos Suryono Hadi menyatakan IKMA atau Ikatan Keluarga Magetan tidak hanya berfungsi sebagai wadah silaturahmi, tapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat solidaritas sosial serta mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan daerah asal.

"Sebagai organisasi IKMA diharapkan mampu mengambil peran sebagai katalisator, fasilitator dan penghubung antar potensi yang ada. Dimana akhirnya marilah kita menjadikan momentum ini sebagai titik konsolidasi meneguhkan komitmen baik kita untuk kemajuan Magetan secara bersama," jelas Ketua IKMA.

Dari sisi ekonomi kerakyatan, agar bisa eksis dan berkembang Yoos menitikpkan pesan kepada UMKM di Magetan dimana penguatan sektor UMKM menjadi penting dan memerlukan pendekatan sistematis melalui peningkatan kualitas produk, inovasi berkelanjutan, adaptasi terhadap teknologi digital, serta penguatan pemasaran.

Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Penghubung Daerah Propinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Anjungan Jawa Timur, Sujono, S.E, menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi

Berbagai momen gelar pentas seni dan Pameran Kabupaten Magetan di anjungan di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, Sabtu malam (17/4/26). (ashar)

warga Magetan di Jakatn dengan pemerintah daerah.

"Acara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan komunikasi antara warga Magetan di Jakarta dan pemerintah daerah. Diharapkan acara ini dapat menghibur dan mengobati kerinduan warga Magetan terhadap kampung halaman, melalui kehadiran tampilan seni tradisi asli Magetan, sebagai hasil kreatifitas para seniman dan seniwati Magetan," ungkap Sujono.

ýyBupati Magetan, Hj. Nanik Sumantri, M.Pd menyampaikan terima kasihnya kepada Propinsi Jawa Timur atas terselenggaranya kegiatan ini. ý"Terima kasih kepada Propinsi Jawa Timur, dimana melalui Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Jakarta atas kerjasama dan kolaborasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan untuk menggelar seni budaya promosi wisata dan ekonomi kreatif untuk mengenalkan Magetan dengan segala potensinya," ungkap Bupati Magetan.

■ Bersambung ke hal. 11 kol. 1

